



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

(audited)

**BA 048.01
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

TAHUN ANGGARAN 2020

(Audited)

Jakarta, April 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PANRB. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2021

Sekretaris Kementerian PANRB,



Dwi Wahyu Atmaji

NIP.19611102 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	9
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	10
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	11
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
NERACA	3
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
A. PENJELASAN UMUM	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	62
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	95
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	124
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Strategis yang telah dicapai pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.....	13
Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang.....	20
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	22
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	23
Tabel 5 Rincian Revisi DIPA untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	25
Tabel 6 Rincian Revisi DIPA per Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	26
Tabel 7 Rincian DIPA per Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	26
Tabel 8 Rincian PNBPN per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	27
Tabel 9 Rincian PNBPN per Kelompok Akun untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	27
Tabel 10 Rincian Realisasi PNBPN Kelompok Akun 4251 per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	28
Tabel 11 Penerimaan Negara Bukan Pajak per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	29
Tabel 12 Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Tuntutan Ganti Rugi TA 2020.....	29
Tabel 13 Pendapatan Lain-Lain per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	30
Tabel 14 Rincian Realisasi PNBPN Kelompok Akun 4259 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	31
Tabel 15 Rincian Realisasi PNBPN Kelompok Akun 4259 per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	31
Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	32
Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	34
Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	34
Tabel 19 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	35
Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	36
Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	37
Tabel 22 Perbandingan Rincian Belanja Pegawai per Satker.....	37
Tabel 23 Pengembalian atas Belanja Pegawai.....	38
Tabel 24 Perbandingan Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	39
Tabel 25 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	40

Tabel 26 Perbandingan Rincian Belanja Honorarium untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	41
Tabel 27 Rincian perbandingan Belanja Honorarium per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	41
Tabel 28 Perbandingan Rincian Belanja Lembur untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	42
Tabel 29 Rincian Perbandingan Belanja Lembur per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	42
Tabel 30 Perbandingan Rincian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	43
Tabel 31 Rincian Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	43
Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Satker Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	44
Tabel 33 Perbandingan Rincian Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	44
Tabel 34 Rincian Realisasi Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	46
Tabel 35 Perbandingan Rincian Belanja Barang Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	47
Tabel 36 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	48
Tabel 37 Perbandingan Rincian Belanja Barang Non Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	49
Tabel 38 Rincian Perbandingan Per Satker Belanja Barang Non untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	49
Tabel 39 Perbandingan Rincian Belanja Barang Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	50
Tabel 40 Rincian Perbandingan Belanja Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	51
Tabel 41 Perbandingan Rincian Belanja Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	51
Tabel 42 Perbandingan Rincian Belanja Jasa per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	52
Tabel 43 Perbandingan Rincian Belanja Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	53
Tabel 44 Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	54
Tabel 45 Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	55

Tabel 46 Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	56
Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	57
Tabel 48 Perbandingan Rincian Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	57
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Bruto dan Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.....	58
Tabel 50 Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	59
Tabel 51 Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	60
Tabel 52 Rincian Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020.....	60
Tabel 53 Perbandingan Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	61
Tabel 54 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara antara Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020	62
Tabel 55 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Berdasarkan Tempat Penyimpanan per 31 Desember 2020	63
Tabel 56 Perbandingan Saldo Pada Rekening Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020.....	63
Tabel 57 Daftar Rekening Bendahara pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020.....	64
Tabel 58 Penjelasan Selisih Rekening Giro RKK dan Rekening VA pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.....	64
Tabel 59 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019....	65
Tabel 60 Rincian Piutang Lainnya Kementerian PANRB TA 2020 yang disetor TA 2021	65
Tabel 61 Mutasi Piutang Lainnya.....	66
Tabel 62 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019....	66
Tabel 63 Perbandingan Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan kategori	67
Tabel 64 Rincian Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akun.....	67
Tabel 65 Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker	68
Tabel 66 Perbandingan Persediaan Per Jenis Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker.....	68
Tabel 67 Perbandingan Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019	69
Tabel 68 Mutasi Aset tetap – Tanah.....	69

Tabel 69 Perbandingan Peralatan dan Mesin antara Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	70
Tabel 70 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	70
Tabel 71 Pembelian Nilai Peralatan dan Mesin.....	71
Tabel 72 Hibah Masuk	72
Tabel 73 Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin.....	73
Tabel 74 Peralatan dan Mesin dari Perolehan Lainnya.....	74
Tabel 75 Pengembangan Nilai Aset Langsung.....	74
Tabel 76 Penghentian Aset Dari Penggunaan	74
Tabel 77 Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra.....	75
Tabel 78 Rincian Gedung dan Bangunan per Satker 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	75
Tabel 79 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	76
Tabel 80 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	77
Tabel 81 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	77
Tabel 82 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020	77
Tabel 83 Rincian Aset Tetap Lainnya pada Tanggal Pelaporan per Akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	78
Tabel 84 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per Satker	78
Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	79
Tabel 86 Mutasi Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020.....	79
Tabel 87 Perbandingan KDP per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	80
Tabel 88 Perbandingan KDP per Satker per 31 Desember 2020.....	80
Tabel 89 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	81
Tabel 90 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	81
Tabel 91 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker per 31 Desember 2020	82
Tabel 92 Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Berdasarkan Akun.....	83
Tabel 93 Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Berdasarkan Akun.....	84
Tabel 94 Penyeteroran Pengembalian ke Kas Negara TP a.n Y.S.....	86
Tabel 95 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	87
Tabel 96 Perbandingan Aset Tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2020	87
Tabel 97 Mutasi Aset Tak Berwujud.....	88

Tabel 98 Rincian Aset Lain-lain per Akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	89
Tabel 99 Perbandingan Aset Lain-lain per Satker per 31 Desember 2020	89
Tabel 100 Mutasi Aset Lain-lain	90
Tabel 101 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	91
Tabel 102 Perbandingan Rincian Belanja yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akun	92
Tabel 103 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	92
Tabel 104 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	93
Tabel 105 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember 2019	94
Tabel 106 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per Satker per 31 Desember 2020	94
Tabel 107 Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	95
Tabel 108 Perbandingan Pendapatan PNBPN pada LRA dan LO 31 Desember 2020	96
Tabel 109 Rincian Pendapatan PNBPN Per Akun LRA 31 Desember 2020	96
Tabel 110 Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	97
Tabel 111 Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020	99
Tabel 112 Rincian Selisih Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020	100
Tabel 113 Rincian Pengembalian Uang Makan PNS Per Satker Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2020	100
Tabel 114 Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	101
Tabel 115 Perbandingan LRA dan LO untuk Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan Desember 2019	102
Tabel 116 Perbandingan Beban Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	102
Tabel 117 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	103
Tabel 118 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2020	105
Tabel 119 Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2020	106
Tabel 120 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	108
Tabel 121 Perbandingan Beban Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan Neto di LO 31 Desember 2020	109
Tabel 122 Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2020	110

Tabel 123 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	112
Tabel 124 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2020	113
Tabel 125 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas per Satker	114
Tabel 126 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	115
Tabel 127 Perbandingan Beban Penyusutan per Satker	116
Tabel 128 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	117
Tabel 129 Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	118
Tabel 130 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar di LRA dan LO 31 Desember 2020	118
Tabel 131 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	120
Tabel 132 Perbandingan Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2020	121
Tabel 133 Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	122
Tabel 134 Belanja LRA dan Beban LO Per 31 Desember 2020	122
Tabel 135 Perbandingan Rincian Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	123
Tabel 136 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	124
Tabel 137 Rincian Akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	125
Tabel 138 Rincian Akun Koreksi Lainnya	126
Tabel 139 Rincian Transaksi Antar Entitas	127
Tabel 140 Rincian Transfer Keluar (Akun 313211)	128
Tabel 141 Rincian Transfer Masuk (Akun 313221)	129
Tabel 142 Rincian Pengesahan Hibah Langsung (Akun 391131)	129
Tabel 143 Rincian Hibah Langsung	130
Tabel 144 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian PANRB	12
Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara	16
Gambar 3 Komposisi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	33

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020

Kami telah melakukan reviu Laporan Keuangan Kementerian PANRB untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian PANRB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 April 2021

Inspektur Kementerian PANRB



^f Budi Prawira

NIP. 19650120 198503 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Laporan Keuangan Kementerian PANRB yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp277.526.891 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp208.970.613.949 atau mencapai 93,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp224.366.346.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp150.057.899.282 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.393.337.919; Aset Tetap sebesar Rp141.254.127.575; Aset Lainnya sebesar Rp1.410.433.788. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.346.725.175 dan Rp143.711.174.107.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp207.047.950.107, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp207.047.950.107. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp211.679.169 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp206.836.270.938.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp103.462.089.728. Ekuitas awal tersebut dikurang Defisit-LO sebesar Rp206.836.270.938 ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas, Defisit sebesar Rp6.777.940.137 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp253.863.295.454 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp143.711.174.107.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		% REAL / ANGG	REALISASI 31 DESEMBER 2019
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN	B				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	277.526.891	0,00%	1.202.847.300
JUMLAH PENDAPATAN		-	277.526.891	0,00%	1.202.847.300
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	90.728.869.000	79.999.636.664	88,17%	83.374.031.254
Belanja Barang	B.2.2	115.370.831.000	110.925.757.586	96,15%	216.017.283.001
Belanja Modal	B.2.3	18.266.646.000	18.045.219.699	98,79%	14.227.366.509
JUMLAH BELANJA		224.366.346.000	208.970.613.949	93,14%	313.618.680.764

Lihat CaLK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jakarta, April 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,****TJAHJO KUMOLO**

NERACA**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI****NERACA****PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya Dan Setara Kas	C.1.1	5.851.237.358	23.771.608
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	126.920.264	120.593.953
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.1.3	(634.600)	(602.970)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETO)		126.285.664	119.990.983
Persediaan	C.1.4	1.415.814.897	1.361.041.177
Jumlah Aset Lancar		7.393.337.919	1.504.803.768
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	32.784.833.000	-
Peralatan Dan Mesin	C.2.2	124.345.957.662	109.999.882.248
Gedung Dan Bangunan	C.2.3	77.217.969.092	72.771.604.892
Jalan, Ingasi Dan Jaringan	C.2.4	1.395.216.550	1.395.216.550
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.869.655.712	1.066.687.595
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	74.916.600	-

Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(96.434.421.041)	(84.096.399.860)
Jumlah Aset Tetap		141.254.127.575	101.136.991.425
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.8	783.139.873	783.412.600
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	C.2.9	(783.139.873)	(783.412.600)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	4.251.103.570	4.214.073.020
Aset Lain-lain	C.3.2	3.303.405.671	2.572.608.800
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(6.144.075.453)	(5.430.082.394)
Jumlah Aset Lainnya		1.410.433.788	1.356.599.426
JUMLAH ASET		150.057.899.282	103.998.394.619
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	6.304.972.806	533.790.332
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2	41.752.369	2.514.559
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.346.725.175	536.304.891

JUMLAH KEWAJIBAN		6.346.725.175	536.304.891
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	143.711.174.107	103.462.089.728
Jumlah Ekuitas		143.711.174.107	103.462.089.728
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		150.057.899.282	103.998.394.619

Lihat CaLK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jakarta, April 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

LAPORAN OPERASIONAL**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER
2019**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	-	2.391.213
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.391.213
BEBAN	D.1.2		
Beban Pegawai	D.1.2.1	79.901.266.114	83.570.982.254
Beban Persediaan	D.1.2.2	5.051.886.631	4.742.766.436
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	53.173.111.500	98.265.890.901
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	10.008.046.959	9.568.926.535
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	42.774.208.599	112.782.810.008
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	16.138.795.704	16.089.986.190
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.7	634.600	-
JUMLAH BEBAN		(207.047.950.107)	(325.021.162.324)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(207.047.950.107)	(325.018.771.111)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.2.1		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	82.121.212	36.123.456
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	92.017.000	4.817.200
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(9.895.788)	31.306.256
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	332.884.395	508.606.554
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	111.309.438	132.076.085
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		221.574.957	376.530.469
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		211.679.169	407.836.725
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(206.836.270.938)	(324.610.934.386)
POS LUAR BIASA			

7 - 11

Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS / DEFISIT LO	D.3	(206.836.270.938)	(324.610.934.386)

Lihat CaLK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jakarta, April 2020

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**


TJAHJO KUMOLO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER
2019**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.1	103.462.089.728	72.568.082.080
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(206.836.270.938)	(324.610.934.386)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(6.777.940.137)	33.116.428.291
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.1	276.303.000	34.454.731.394
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	(96.796.862)	(1.342.690.177)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.3	(6.957.446.275)	4.387.074
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	253.863.295.454	322.388.513.743

KENAIKAN EKUITAS	E.5	40.249.084.379	30.894.007.648
EKUITAS AKHIR	E.6	143.711.174.107	103.462.089.728

CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, April 2020

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ditetapkan sebagai Bagian Anggaran (048) menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sejak TA 2017, jumlah satuan kerja (satker) pada Kementerian PANRB bertambah menjadi 2 (dua) satker yaitu Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan kode satker 427950 dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kode satker 015416. Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan kedua satker tersebut.

Profil dan
Kebijakan
Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PANRB

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan dalam rangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan alasan tersebut, Reformasi Birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi Birokrasi harus disertai rencana tindak (*action*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan upaya, Reformasi Birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial.

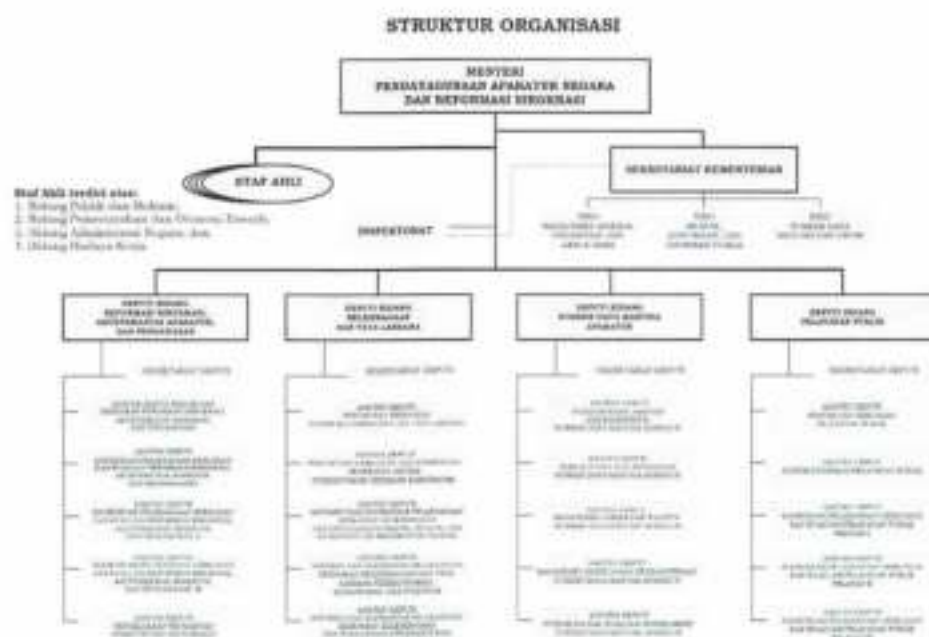
Mengingat pentingnya Reformasi Birokrasi tersebut, maka dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang terdiri dari 14 Prioritas Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju. Prioritas yang pertama dari ke-14 Prioritas Nasional tersebut adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Reformasi Birokrasi yang di dalamnya meliputi penataan kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, serta Pelayanan Publik. Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas

tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tertuang dalam Pasal 27 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik dalam melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, struktur Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian PANRB



Visi dan misi Kementerian PANRB dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selama periode TA 2020, output strategis yang telah dicapai pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai berikut:

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 1 Output Strategis yang telah dicapai pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyelesaian (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1.	2823.005	Unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBB-M di wilayah II	778.270.000	753.620.115	96,83	155	169	109,03
2.	2824.005	Unit kerja di wilayah II yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBB-M	699.805.000	676.107.287	96,61	165	200	121,21
3.	2825.005	Unit kerja di wilayah III yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat	859.950.000	829.736.718	96,49	165	193	116,97

		WSK/WBB M						
4	2823.006	IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah I	15.315.000	9.080.000	59,29	182	182	100
5	2824.006	IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah II	246.450.000	187.186.767	75,95	159	159	100
6	2825.006	IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah III	191.690.000	180.069.538	93,94	175	175	100
7	2823.007	IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.050.600.000	2.022.764.561	98,63	217	218	100,46

		(SAKIP) di wilayah I						
8	2824.007	IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah II	1.561.473.000	1.534.796.900	98,29	189	189	100
9	2825.007	IP yang dievaluasi SAKIP di wilayah III	1.655.200.000	1.630.004.000	98,48	210	214	101,90
10	5091.010	IP yang dievaluasi SAKIP di wilayah III	578.299.000	538.061.000	93,04	30	1	3,33

Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tugas, fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Ketua (Perka) Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam Perka tersebut, telah ditentukan penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara, yang meliputi: (a) Pengawasan Penerapan Sistem Merit; (b) Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; dan (c) Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN. Penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang pengawasan dikombinasikan dengan lingkup wilayah instansi pemerintah yakni instansi pemerintah kementerian/lembaga dalam lingkup: bidang politik, hukum dan keamanan; bidang perekonomian; bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan bidang kemaritiman dan investasi; serta lingkup pengawasan wilayah provinsi termasuk di dalamnya

wilayah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah provinsi tersebut dengan mempertimbangkan wilayah kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan tugas tersebut, sesuai penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara ditugaskan sebagai koordinator pengawasan, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I;
- Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II;
- Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I;
- Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II;
- Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

Dalam struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara, terdapat 5 (lima) kelompok kerja (pokja) dengan pembagian seperti pada gambar 2. Masing-masing pokja didukung oleh Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional serta Sekretariat sebagai dukungan administrasi.

Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara



Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). Laporan Keuangan ini mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PANRB.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang digunakan di lingkup Kementerian PANRB terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Perlu diinformasikan pula bahwa pada tahun 2020 Kementerian PANRB menjadi salah satu dari lima K/L peserta *piloting* yang menerapkan Aplikasi SAKTI *full module* yaitu mulai dari Modul Admin, Penganggaran, Komitmen, Aset Tetap, Bendahara, Pembayaran, Persediaan, Piutang, hingga Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP). Oleh karena itu, Kementerian PANRB sudah tidak menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Tahun 2020.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian PANRB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PANRB dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam CaLK.
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

*Surplus /
Defisit-LRA*

5. Surplus/Defisit-LRA

- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan.

*Surplus /
Defisit-LO*

6. Surplus/Defisit-LO

- Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Aset

7. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember 2020.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan usaha penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.6/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
1. Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
2. Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
3. Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4. Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi menjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pos Piutang Jangka Panjang.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset
Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Pengukuran
Aset Tetap*

e. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaatnya. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban 8. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **9. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PANRB telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait adanya Pandemi COVID-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan di Kementerian PANRB.

Perubahan DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Revisi DIPA untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	
	Estimasi / Anggaran Awal	Estimasi / Anggaran Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	93.129.140.000	90.728.859.000
Belanja Barang	202.219.868.000	115.370.831.000
Belanja Modal	9.271.890.000	18.266.646.000
Jumlah Belanja	304.620.898.000	224.366.346.000

Sedangkan apabila berdasarkan program, rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Revisi DIPA per Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Program	31 Desember 2020	
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
00.00.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PANRB	168.862.164.000	156.020.523.000
00.00.06	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	116.373.008.000	58.625.666.000
00.00.07	Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	19.385.706.000	9.720.157.000
	Jumlah Anggaran Belanja	304.620.898.000	224.366.346.000

Apabila berdasarkan satker, rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian DIPA per Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Satuan Kerja	2020	
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	49.279.704.000	39.614.155.000
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	255.341.194.000	184.752.191.000
	Jumlah	304.620.898.000	224.366.346.000

Realisasi Pendapatan
Rp277.526.891

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp277.526.891. Kementerian PANRB hanya memiliki pendapatan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum dan tidak memiliki PNBP Fungsional. Pendapatan Kementerian PANRB seluruhnya merupakan PNBP terdiri

dari pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN, pendapatan dari pengelolaan keuangan, dan pendapatan lain-lain.

PNBP Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp277.526.891 tersebut tersebar pada 2 (dua) satker Kementerian PANRB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian PNBP per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Estimasi	Realisasi 31 Desember 2020	% Est.
1	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	9.120.000	-
2	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	268.406.891	-
	Jumlah	-	277.526.891	-

Tabel 9 Rincian PNBP per Kelompok Akun untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Kelompok Akun	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	% Naik (Turun)
1	Pendapatan Dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	82.121.212	36.123.456	127,33
2	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	13.070.727	818.181	1.497,53
3	Pendapatan Denda	-	2.044.094	(100)
4	Pendapatan Lain-lain	182.334.952	1.163.860.669	(84,33)
	Jumlah	277.526.891	1.202.847.300	(76,93)

Pendapatan dari
Penjualan dan
Pengelolaan BMN
Rp82.121.212

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN

Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.121.212 dan Rp36.123.456. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 127,33 persen bila dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh Penjualan/Lelang Aset Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada TA 2020 lebih besar dibandingkan TA 2019.

Rincian Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN per satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menurut akun adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Satuan Kerja	31 Desember 2020		
		Estimasi	Realisasi	% Est.
425129	Menteri Negara-Pendayagunaan Aparatur Negara	-	82.121.212	-
	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
	Total	-	82.121.212	-

Sebagai Catatan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan penjualan/penggantian Aset selama TA 2020 dikarenakan kebutuhan dan usia aset masih terbilang baru.

Pendapatan Bunga,
Pengelolaan Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan Keuangan
Rp13.070.727

B.1.2 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.070.727 dan Rp818.181. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.497,53 persen. Berikut rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per Satker:

Tabel 11 Penerimaan Negara Bukan Pajak per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
1	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	13.070.727	818.181	1.497,53
2	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
Jumlah		13.070.727	818.181	1.497,53

Kenaikan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ini disebabkan oleh:

1. Peningkatan Pendapatan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Barang Milik Negara a.n. VSL dan ALI pada tanggal 16 November 2020 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 176 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Tim Penyelesaian Kerugian Nomor 154/BN.99/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Harga *Notebook* Barang Milik Negara Tahun Perolehan 2017 masing-masing sebesar Rp6.399.000.

Tabel 12 Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Tuntutan Ganti Rugi TA 2020

(dalam Rupiah)

No	NTPN	Tanggal Setor	Uraian	Nilai
1	E30537QLTKDH8074	27 November 2020	Pembayaran Ganti Rugi BMN a.n. A.L.S 16112020	6.399.000
2	ZADD50N9UVQDVUF8	29 November 2020	Pembayaran Ganti Rugi BMN a.n. VSL 16112020	6.399.000
Jumlah				12.798.000

2. Adanya Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (425792) a.n. Y.S sebesar Rp272.727.

Pendapatan Lain-Lain
Rp182.334.952

B.1.3 Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp182.334.952 dan Rp1.163.860.669. Pendapatan Lain-Lain 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 84,33 persen. Penurunan signifikan dapat dilihat pada Pengembalian Belanja Barang yang berkurang sejauh 86,88 persen dibandingkan TA sebelumnya. Penurunan Pendapatan Lain-Lain pada Tahun 2020 disebabkan oleh sebagian besar pembayaran menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Hal ini terjadi karena dari pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan melalui Surat Nomor S-2135/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19.

Tabel 13 Pendapatan Lain-Lain per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	425111	-	40.483.950	-	-
2	425912	-	132.731.002	-	9.120.000
Jumlah		-	173.214.952	-	9.120.000

Rincian Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Estimasi	Realisasi	Realisasi	
425911	-	40.483.950	21.599.838	87,43
425912	-	141.851.002	1.081.218.540	(86,88)
425913	-	-	60.696.072	(100,00)
425991	-	-	346.219	(100,00)
Total	-	182.334.952	1.163.860.669	(84,33)

Rincian Pendapatan Lain-Lain per satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menurut akun adalah sebagai berikut, hanya terdapat 2 akun Pendapatan Lain-lain yaitu Pengembalian Belanja Pegawai TAYL (425911) dan Pengembalian Belanja Barang TAYL (425912):

Tabel 15 Rincian Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Satuan Kerja	31 Desember 2020		
		Estimasi	Realisasi	% Est.
425911	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	40.483.950	-
425912	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	9.120.000	-
425912	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	132.731.002	-
Total		-	182.334.952	-

Realisasi Belanja
Rp208.970.613.949

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp208.970.613.949 atau 93,14 persen dari anggaran belanja sebesar Rp224.366.346.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp774.430.757. Keseluruhan belanja di Kementerian PANRB berasal dari belanja rupiah murni. Kementerian PANRB tidak memiliki belanja PNPB maupun belanja hibah. Rincian anggaran dan realisasi belanja Kementerian PANRB terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

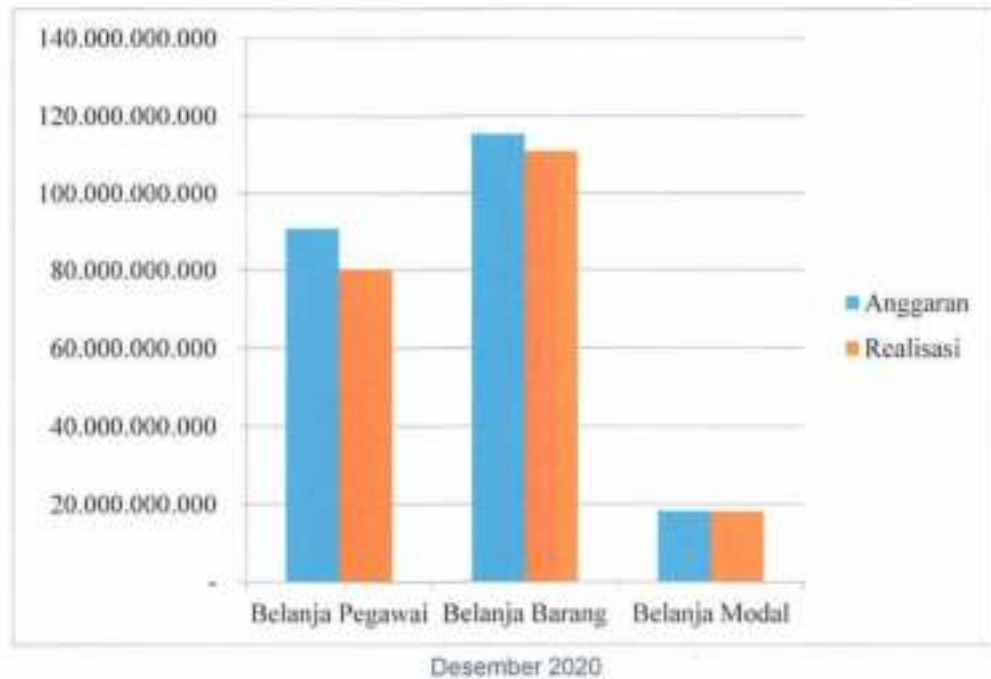
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				
	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	% Real Bruto / Angg
Belanja Pegawai	90.728.869.000	80.012.025.731	(12.389.067)	79.999.636.664	88,19
Belanja Barang	115.370.831.000	111.687.799.276	(762.041.690)	110.925.757.586	96,81
Belanja Modal	18.266.646.000	18.045.219.699	(-)	18.045.219.699	98,79
Jumlah	224.366.346.000	209.745.044.706	(774.430.757)	208.970.613.949	93,14

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak mencapai 100 persen dari anggaran disebabkan sebagian besar oleh kondisi Pandemi COVID-19 yang melanda masing-masing negara dan membuat banyak kegiatan/rencana dihentikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan pegawai Kementerian PANRB. Perubahan pola kerja yang dititikberatkan pada pencegahan penularan COVID-19, dan mengubah pola kerja menjadi *Work From Home* (WFH) sehingga penyesuaian pada pola absensi dan tata cara kerja harus dihadapi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali Pegawai Kementerian PANRB.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3 Komposisi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31



Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: Realisasi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PANRB (00.00.01) merupakan program dengan persentase realisasi terendah jika dibandingkan dengan Program lainnya dikarenakan pada program 00.00.01 lebih banyak mendukung dan membiayai kegiatan perkantoran (rapat, pemeliharaan, protokoler, dan lain-lain) yang sebagian besar menjadi lebih efisien dikarenakan pola kerja WFH dan kondisi Pandemi COVID-19.

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2020		
		Anggaran	Realisasi	% Real /Angg.
00.00 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PANRB	156.020.523.000	143.329.540.637	91,87
00.00 05	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	58.625.666.000	56.355.939.499	96,13
00.00 07	Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	9.720.157.000	9.285.133.813	95,52
	Jumlah	224.366.346.000	208.970.613.949	93,14

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi per satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi Bruto 31 Desember 2020	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto 31 Desember 2020	% Real Bruto / Angg.
Komisi Aparatur Sipil Negara	39.614.155.000	36.293.423.921	235.011.950	36.058.411.971	91,62
Menteri Negara Pendayaguna an Aparatur Negara	184.752.191.000	173.451.620.785	539.418.807	172.912.201.978	93,88
Jumlah	224.366.346.000	209.745.044.706	774.430.757	208.970.613.949	93,48

Target Realisasi 2020 tidak mencapai 95 persen dari total anggaran, dan lebih rendah dari TA sebelumnya dikarenakan kondisi global Pandemi COVID-19 yang banyak mengubah perencanaan dan membatalkan kegiatan sehingga anggaran lebih banyak direvisi untuk membantu Program Pemerintah Pusat/Nasional untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Adapun penghematan/pemotongan untuk PC-PEN lebih banyak diambil dari Belanja Barang (52) sehingga terdapat penurunan yang signifikan pada Akun Belanja tersebut jika dibandingkan pada TA sebelumnya sebesar 48,65 persen. Adapun rincian perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Belanja Pegawai	79.999.636.664	83.374.031.254	(4,05)
Belanja Barang	110.925.757.586	216.017.283.001	(48,65)
Belanja Modal	18.045.219.699	14.227.366.509	26,83
Jumlah	208.970.613.949	313.618.680.764	(33,37)

Berdasarkan tabel di atas, total realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 33,37 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Program Nasional PC-PEN mengharapkan banyak Kementerian dan Bagian Anggaran untuk merevisi anggaran (mengurangi) untuk dialihkan pada program-program pemerintah yang lebih berfokus menanggulangi bencana (*Force Majeure*) Pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Dimana Kementerian Keuangan mengatur dan menyalurkan Anggaran PC-PEN tersebut.

Belanja Pegawai
Rp79.999.636.664

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.999.636.664 dan Rp83.374.031.254. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian realisasi belanja pegawai per satker di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2020	% Angg
1	Komisi Aparatur Sipil Negara	12.992.072.000	11.158.266.847	85,89
2	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	77.736.797.000	68.841.369.817	88,58
	Jumlah	90.728.869.000	79.999.636.664	88,17

Realisasi Belanja Pegawai berada pada tingkat dibawah 90 persen dikarenakan penyesuaian Jabatan. Pola Kerja WFH banyak memangkas realisasi tunjangan, berikut dengan beberapa kondisi khusus dimana pegawai dengan kasus positif COVID-19 mengurangi penyerapan pada realisasi Belanja Pegawai.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi Belanja Pegawai secara administratif dan pelaksanaan, seperti:

1. Kebijakan Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya yang tidak diberikan/dipotong/disesuaikan untuk para pejabat Eselon II ke atas, dalam rangka penghematan dan mendukung program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Aktivitas Pengadaan CPNS di Tahun 2020 menjadi tertunda melihat kondisi kesehatan masyarakat (COVID-19) pada Tahun 2020 sehingga kegiatan pengadaan pegawai CPNS baru akan dilaksanakan di TA berikutnya jika keadaan membaik. Hal ini juga membuat Belanja Pegawai yang disiapkan untuk CPNS baru menjadi tidak terserap.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Naik/turun (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	34.275.756.949	30.510.056.781	12,34
5121	Belanja Honorarium	6.081.790.449	6.754.213.042	(9,96)
5122	Belanja Lembur	289.729.000	562.605.000	(48,50)
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	38.364.749.333	45.565.580.613	(13,61)
Jumlah Belanja Kotor		80.012.025.731	83.392.455.416	(4,05)
Pengembalian Belanja Pegawai		(12.389.067)	(18.424.162)	-
Jumlah Belanja Pegawai		79.999.636.664	83.374.031.254	(4,05)

Tabel 22 Perbandingan Rincian Belanja Pegawai per Satker

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	31.382.478.002	2.882.228.511
5121	Belanja Honorarium	91.875.000	5.989.915.449
5122	Belanja Lembur	263.279.000	26.130.000
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	37.103.737.815	2.259.992.887
Jumlah		68.841.369.817	11.158.266.847

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 4,05 persen bila dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Belanja Honorarium (5121) yang mengalami pengurangan sebesar 9,96 persen dikarenakan honor dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkurang dengan pembatasan kerja karena pandemi COVID-19. Belanja Lembur (5122) mengalami pengurangan yang paling besar, yaitu 48,50 persen, jika dibandingkan TA sebelumnya karena adanya kebijakan yang melarang kegiatan lembur. Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124) mengalami penurunan sebesar 13,61 persen dikarenakan adaptasi pada Kelas Jabatan dan Pola Kerja absensi WFH dan *e-report* yang masih dilakukan oleh pegawai selama TA 2020. Detail bersih dari Belanja di atas dapat dijelaskan pada tabel di bawah, terdapat sejumlah kecil pengembalian atas Belanja Pegawai dikarenakan penyesuaian perhitungan pada Aplikasi Penggajian (GPP/Modul Bendahara Gaji).

Tabel 23 Pengembalian atas Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019			%
		Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	34.275.756.949	11.050.436	34.264.706.513	30.510.066.761	5.639.522	30.504.417.239	12,33
5121	Belanja Honorarium	6.081.790.449	-	6.081.790.449	6.754.213.042	-	6.754.213.042	(9,96)
5122	Belanja Lembur	289.729.000	320.000	289.409.000	562.605.000	-	562.605.000	(48,56)
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	39.364.749.333	1.018.631	39.363.730.702	45.565.580.613	12.784.640	45.552.795.973	(13,59)
Jumlah Belanja Pegawai		80.012.025.731	12.389.067	79.999.636.664	83.392.455.416	18.424.162	83.374.031.254	(4,05)

*Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp34.264.706.513*

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.264.706.513 dan Rp30.504.417.239. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,33 persen dibandingkan 31 Desember 2019. Perubahan paling signifikan terjadi pada pos Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar 89,37 persen hal ini disebabkan perubahan struktur jabatan pada PNS yang mulai mengadopsi Struktur Jabatan Fungsional (Perpres No. 68 Tahun 2017) dan meninggalkan jabatan struktural secara bertahap.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	23.157.184.647	20.457.664.730	13,20
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	359.538	330.772	8,70
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.223.712.884	1.218.639.112	0,42
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	318.475.264	321.730.067	(1,01)
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	3.114.805.000	3.407.430.540	(8,59)
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	545.585.000	288.110.000	89,37
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	155.336.836	196.096.540	(20,79)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	942.111.780	906.511.000	3,93
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.045.286.000	2.956.384.000	36,83
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	772.900.000	757.160.000	2,08
Jumlah Belanja Kotor		34.275.756.949	30.510.066.761	12,34
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		(11.050.436)	(5.639.522)	-
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		34.264.706.513	30.504.417.239	12,33

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan per Satker 31 Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	511111	22.616.800.000	21.350.591.159	1.800.116.000	1.800.116.400
2.	511119	439.000	328.383	47.000	31.155
3.	511121	1.948.382.000	1.197.784.684	25.459.000	25.458.270
4.	511122	527.559.000	316.061.389	2.322.000	2.319.886
5.	511123	3.288.000.000	2.976.000.000	239.540.000	136.570.000
6.	511124	612.100.000	544.325.000	192.604.000	-
7.	511125	168.000.000	151.683.020	7.748.000	3.653.818
8.	511128	951.761.000	887.434.680	57.435.000	54.387.420
9.	511129	4.726.720.000	3.319.489.700	766.902.000	725.575.000
10.	511151	710.840.000	638.780.000	134.120.000	134.120.000
Jumlah		35.552.601.000	31.382.478.002	3.226.293.000	2.882.228.511

Belanja Honorarium
Rp6.081.790.449

B.2.1.2 Belanja Honorarium

Realisasi Belanja Honorarium untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.081.790.449 dan Rp6.754.213.042. Realisasi Belanja Honorarium 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 9,96 persen. Pandemi COVID-19 banyak membuat kegiatan yang menghasilkan Honorarium bagi pegawai dibatalkan dan diubah untuk menjaga dan menjauhi potensi penyebaran penyakit COVID-19, kebijakan daerah dan kantor berdampak pada kegiatan perkantoran tidak dapat dilakukan secara biasa (normal) dengan pembatasan sosial dan mengurangi pergerakan masyarakat sehingga menurunkan kegiatan perekonomian dan realisasi terhadap Belanja Uang Honor Tetap.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Rincian Belanja Honorarium untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
512111	Belanja Uang Honor Tetap	6.081.790.449	6.754.213.042	(9,96)
	Jumlah Belanja Kotor	6.081.790.449	6.754.213.042	(9,96)
	Pengembalian Belanja Honorarium	-	-	-
	Jumlah Belanja Honorarium	6.081.790.449	6.754.213.042	(9,96)

Rincian perbandingan Belanja Honorarium per Satker untuk periode berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian perbandingan Belanja Honorarium per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	512111	183.750.000	91.875.000	7.223.142.000	5.989.915.449
	Jumlah	183.750.000	91.875.000	7.223.142.000	5.989.915.449

Belanja Lembur
Rp289.409.000

B.2.1.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp289.409.000 dan Rp562.605.000. Realisasi Belanja Lembur 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 48,56 persen. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi COVID-19 yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat atas terjadinya Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Pandemi tersebut yang pada akhirnya membuat banyak pegawai menghindari aktivitas di

perkantoran maupun pergerakan pada saat akhir pekan (Sabtu-Minggu) di mana kegiatan lembur dilaksanakan. Sehingga beberapa kegiatan lembur di kantor yang telah direncanakan pada akhirnya sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Perbandingan Rincian Belanja Lembur untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
512211	Belanja Uang Lembur	289.729.000	562.605.000	(48,50)
	Jumlah Belanja Kotor	289.729.000	562.605.000	(48,50)
	Pengembalian Belanja Lembur	(320.000)	-	-
	Jumlah Belanja Lembur	289.409.000	562.605.000	(48,56)

Rincian perbandingan Belanja Lembur per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perbandingan Belanja Lembur per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	512211	416.400.000	263.279.000	68.318.000	26.130.000
	Jumlah	416.400.000	263.279.000	68.218.000	26.130.000

*Belanja Tunjangan
Khusus & Belanja
Pegawai Transito
Rp39.363.730.702*

B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp39.363.730.702 dan Rp45.552.795.973. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 13,59 persen. Penyesuaian absensi dan *grade* jabatan fungsional pada BA. 048 Kementerian PANRB menyebabkan proses adaptasi yang belum bisa disesuaikan pada sebagian pegawai, berikut dengan penyesuaian *grade* jabatan fungsional.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Rincian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
512411	Belanja Pegawai Bruto (Tunjangan Khusus/ Keglatan)	39.364.749.333	45.565.680.613	(13,61)
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	(1.018.631)	(12.784.640)	-
	Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	39.363.730.702	45.552.795.973	(13,59)

Rincian perbandingan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	512411	41.584.046.000	37.103.737.815	2.474.319.000	2.259.992.887
	Jumlah	41.584.046.000	37.103.737.815	2.474.319.000	2.259.992.887

Belanja Barang

Rp110.925.757.586

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp110.925.757.586 dan Rp216.017.283.001. Definisi Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Dalam lingkup Kementerian PANRB Belanja Barang lebih mencakup kegiatan administrasi perkantoran dan kebutuhan persediaan perkantoran untuk mendukung kegiatan tersebut (rapat, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan perkantoran, dll).

Adapun rincian realisasi Belanja Barang per satker di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Satker Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2020	% Angg
1	Komisi Aparatur Sipil Negara	19.705.345.000	18.141.179.757	92,06
2	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	95.665.486.000	92.784.577.829	96,99
Jumlah		115.370.831.000	110.925.757.586	96,15

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Rincian Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
5211	Belanja Barang Operasional	11.726.386.649	8.348.887.656	40,45

5212	Belanja Barang Non Operasional	8.901.721.850	21.332.133.062	(58,27)
5218	Belanja Barang Persediaan	5.311.301.102	4.672.406.931	13,67
5221	Belanja Jasa	32.159.034.036	59.650.174.670	(45,99)
5231	Belanja Pemeliharaan	10.067.242.203	9.536.568.249	5,56
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43.522.113.436	105.024.583.289	(58,56)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	10.268.061.034	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		111.687.799.276	218.732.814.791	(48,94)
Pengembalian Belanja Barang		(762.041.690)	(2.715.631.790)	-
Jumlah Belanja Barang		110.925.757.586	216.017.283.001	(48,65)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 48,65 persen. Secara kebijakan merupakan efek dari penghematan dan dukungan atas program PC-PEN (Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga banyak terjadi pemangkasan anggaran di TA 2020 untuk dialihkan ke PC-PEN. Pengurangan paling besar diambil dari empat akun:

1. Belanja Barang Non Operasional (5212): Kegiatan rapat di luar kantor, baik di hotel atau ruang seminar banyak dipotong dan dihindari agar dapat dilakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pengelompokan/pengumpulan individu pada suatu acara atau ruangan.
2. Belanja Jasa (5221): Kegiatan yang menghadirkan jasa narasumber maupun kegiatan *focus group*, honor penggelar rapat (moderator, notula, dll) sama halnya dengan Belanja Barang Non Operasional (5212) agar untuk dihindari dan tidak dilakukan selama kondisi pandemi berlangsung.

Belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri (5241 & 5242): Kondisi global dari pandemi COVID-19 membuat kegiatan yang berupa aktivitas berpindah lokasi dari satu daerah ke daerah lainnya sangat tidak dianjurkan dan diawasi dengan ketat, berikut dengan kebijakan nasional negara lain yang menutup gerbang kedatangan bagi warga negara lain sehingga aktivitas perjalanan dinas luar negeri dipotong secara penuh (100 persen).

Tabel 34 Rincian Realisasi Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019			%
		Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	
5211	Belanja Barang Operasional	11.724.786.649	1.600.000	11.724.786.649	8.348.887.656	-	8.348.887.656	40,44
5212	Belanja Barang Non Operasional	8.901.721.850	-	8.901.721.850	21.332.133.062	-	21.332.133.062	(58,27)
5218	Belanja Barang Persediaan	5.311.301.102	-	5.311.301.102	4.672.406.931	-	4.672.406.931	13,67
5221	Belanja Jasa	32.159.034.036	-	32.159.034.036	59.550.174.570	223.384.524	59.326.790.046	(45,79)
5231	Belanja Pemeliharaan	10.067.242.203	23.300.000	10.043.942.203	9.536.566.249	-	9.536.566.249	5,32
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43.522.113.436	737.141.690	42.784.971.746	105.024.583.289	2.321.902.892	102.702.680.397	(58,34)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	10.268.061.034	170.244.374	10.097.816.660	(100,00)
Jumlah Belanja Barang		111.687.799.278	762.041.690	110.925.757.586	218.732.814.791	2.715.531.790	216.017.283.001	(48,55)

Belanja Barang Operasional
Rp11.724.786.649

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.724.786.649 dan Rp8.348.887.656. Realisasi Belanja Barang Operasional mengalami peningkatan sebesar 40,44 persen. Peningkatan ini didominasi oleh akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) yang merupakan belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan namun diperlukan untuk operasional perkantoran secara berlanjut, seperti penyediaan air

minum, tenaga pramusaji, dan keamanan, serta dapat digunakan untuk mencatat biaya pengadaan/penggantian inventaris di bawah nilai kapitalisasi (kurang dari Rp1.000.000 untuk ATK dan Peralatan Mesin, dan kurang dari Rp25.000.000 untuk Gedung & Bangunan dan Aset Tetap dalam Renovasi (ATR)).

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Rincian Belanja Barang Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	7.373.792.823	4.752.006.712	55,17
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	300.000	0	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	417.646.888	633.089.382	(34,03)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	756.620.000	782.430.000	(3,02)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.526.623.346	2.161.361.562	15,83
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	649.203.792	0	-
Jumlah Belanja Kotor		11.726.386.649	8.348.887.656	40,45
Pengembalian Belanja Barang Operasional		(1.600.000)	-	-
Jumlah Belanja Barang Operasional		11.724.786.649	8.348.887.656	40,44

Rincian Belanja Barang Operasional per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	521111	5.784.513.000	5.712.231.650	1.661.700.000	1.659.961.173
2	521113	-	-	300.000	300.000
3	521114	116.193.000	105.866.667	357.468.000	311.780.001
4	521115	604.380.000	601.320.000	160.680.000	157.500.000
5	521119	2.298.793.000	2.282.069.710	282.352.000	244.553.636
6	521131	398.534.000	-	386.589.000	294.593.005
Jumlah		9.202.413.000	9.066.098.834	2.859.089.000	2.666.687.815

Belanja Barang Non
Operasional
Rp8.901.721.850

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.901.721.850 dan Rp21.332.133.062. Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 58,27 persen. Belanja Barang Non Operasional cenderung digunakan untuk kebutuhan rapat di ruang seminar atau penginapan, dikarenakan Pandemi COVID-19 aktivitas-aktivitas yang bersifat mengumpulkan personil/individu dalam jumlah yang banyak tidak diperbolehkan sehingga banyak anggaran yang tidak dapat digunakan secara maksimal pada TA 2020.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Rincian Belanja Barang Non Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
521211	Belanja Bahan	6.448.936.850	14.793.347.026	(56,41)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	805.640.000	1.855.479.000	(67,38)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.684.514.000	4.682.307.036	(64,02)
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	162.631.000	0	-
Jumlah Belanja Kotor		8.901.721.850	21.332.133.062	(58,27)
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional		-	-	-
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		8.901.721.850	21.332.133.062	(58,27)

Rincian perbandingan Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Perbandingan Per Saker Belanja Barang Non untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		Jumlah
		Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisai Aparatur Sipil Negara	
521211	Belanja Bahan	6.113.490.156	335.446.694	6.448.936.850
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	575.240.000	30.400.000	605.640.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.268.884.000	415.650.000	1.684.514.000
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	149.431.000	13.200.000	162.631.000
Jumlah Belanja Kotor		8.107.025.156	794.696.694	8.901.721.850

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	8.107.025.156	794.696.694	8.901.721.850

Belanja Barang
Persediaan
Rp5.311.301.102

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.311.301.102 dan Rp4.672.406.931. Realisasi Belanja Barang Persediaan mengalami peningkatan sebesar 13,67 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai pada Kementerian PANRB yang secara garis lurus meningkatkan jumlah konsumsi dan kebutuhan dari Barang Persediaan (ATK, percetakan/kertas, alat rumah tangga, dll). Jumlah belanja kotor yang melebihi akun 521811 merupakan Reklasifikasi Barang Persediaan yang terealisasi melalui akun 521111(Belanja Keperluan Perkantoran)/521119 (Barang Operasional Lainnya contoh pengadaan kartu *pass* bandara, *E-toll card*, dsb.)/521211(Belanja Bahan contoh, Piagam atau *souvenir* yang tersisa sehingga menjadi persediaan)/521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya contoh seminar kit yang tidak tersalurkan berupa buku cetakan sehingga menjadi persediaan).

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Perbandingan Rincian Belanja Barang Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.123.089.478	4.672.406.931	(11,76)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.188.211.624	0	-
Jumlah Belanja Kotor		5.311.301.102	4.672.406.931	13,67
Pengembalian Belanja Barang Persediaan		-	-	-
Jumlah Belanja Barang Persediaan		5.311.301.102	4.672.406.931	13,67

Rincian perbandingan Belanja Persediaan per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Perbandingan Belanja Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	521611	3.734.853.000	3.647.039.638	484.318.000	476.049.840
2	521632	-	-	-	-
3	521641	1.190.906.000	1.188.211.624	-	-
Jumlah		4.925.759.000	4.835.251.262	484.318.000	476.049.840

Belanja Jasa

Rp32.139.034.036

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.139.034.036 dan Rp59.326.790.046. Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 45,79 persen. Diakibatkan pandemi COVID-19 Penggunaan fasilitas kantor mengalami penghematan yang signifikan dikarenakan jumlah pegawai yang menghadiri kantor sangat terbatas dan menyesuaikan dengan peraturan pembatasan sosial sehingga banyak menghemat/memangkas belanja-belanja jasa jika dibandingkan dengan keadaan biasa (normal).

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Perbandingan Rincian Belanja Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenakan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
522111	Belanja Langganan Listrik	2.579.088.046	2.749.388.072	(6,19)
522112	Belanja Langganan Telepon	90.579.142	125.923.914	(28,07)

522113	Belanja Langganan Air	1.619.095	12.195.739	(86,72)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.685.774.554	1.515.415.980	11,24
522131	Belanja Jasa Konsultansi	2.834.069.000	19.014.414.813	(85,10)
522141	Belanja Sewa	3.642.164.225	2.986.288.591	21,96
522151	Belanja Jasa Profesi	5.261.145.000	9.836.475.000	(45,40)
522191	Belanja Jasa Lainnya	10.789.770.165	23.510.082.471	(54,19)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.294.824.809	0	-
	Jumlah Belanja Kotor	32.159.034.036	59.550.174.570	(45,99)
	Pengembalian Belanja Jasa	-	(223.384.524)	-
	Jumlah Belanja Jasa	32.159.034.036	59.326.790.046	(45,79)

Rincian perbandingan Belanja Jasa per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan Rincian Belanja Jasa per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	522111	1.920.000.000	1.862.184.366	733.645.000	716.903.680
2	522112	102.000.000	81.872.357	18.000.000	8.706.785
3	522113	7.200.000	1.619.095	-	-
4	522119	780.000.000	780.000.000	996.625.000	905.774.554
5	522131	2.533.992.000	2.519.744.000	315.000.000	314.325.000
6	522141	1.040.820.000	984.778.000	2.900.115.000	2.657.386.225

7	522151	5.094.033.000	4.892.745.000	490.520.000	458.400.000
8	522191	8.544.146.000	8.421.262.031	2.374.212.000	2.348.508.134
9	522192	5.287.235.000	5.042.148.928	712.530.000	252.675.881
Jumlah		25.309.228.000	24.496.353.777	8.540.847.000	7.662.680.259

Belanja

Pemeliharaan

Rp10.043.942.203

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.043.942.203 dan Rp9.536.568.249. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 5,32 persen. Perubahan dominan terjadi dikarenakan peningkatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) hal ini merupakan pemeliharaan kondisi aset/Peralatan dan mesin yang tidak bersifat rutin dan insidental. Seperti kerusakan mesin atau kecelakaan yang menyebabkan suatu aset perlu diperbaiki untuk kembali berfungsi seperti semula.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Perbandingan Rincian Belanja Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4.536.378.718	4.215.887.609	7,58
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Penanganan COVID-19	11.850.000	-	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.003.856.165	5.036.188.630	(0,64)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	516.157.320	284.492.010	81,43
Jumlah Belanja Kotor		10.067.242.203	9.536.568.249	5,56

Pengembalian Belanja Pemeliharaan	(23.300.000)	-	-
Jumlah Belanja Pemeliharaan	10.043.942.203	9.636.568.249	5,32

Rincian perbandingan Belanja Pemeliharaan per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	523111	4.015.286.000	3.990.033.718	554.539.000	545.345.000
2	523114	-	-	11.850.000	11.850.000
3	523121	3.906.270.000	3.906.051.975	1.172.338.000	1.074.504.190
4	523129	3.000.000	-	539.655.000	516.157.320
Jumlah		7.942.556.000	7.896.085.693	2.278.382.000	2.147.856.510

*Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp42.784.971.746*

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp42.784.971.746 dan Rp102.702.680.397. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 58,34 persen. Kondisi Pandemi COVID-19 membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat Perjalanan untuk sangat dibatasi dan diawasi dengan ketat. Hal ini membuat penurunan drastis pada realisasi Belanja tersebut.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	20.053.381.290	51.738.507.535	(61,24)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	431.040.000	1.318.350.000	(67,30)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.467.051.500	34.336.840.254	(49,13)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.315.940.640	17.630.886.500	(69,85)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penangan COVID-19	254.720.000	0	-
Jumlah Belanja Kotor		43.522.113.436	105.024.583.289	(58,56)
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri		(737.141.690)	(2.321.902.892)	-
Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri		42.784.971.746	102.702.680.397	(58,34)

Rincian perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	524111	16.931.803.000	16.144.430.967	3.409.274.000	3.173.963.639
2.	524113	439.350.000	353.640.000	86.850.000	77.400.000
3.	524114	17.257.113.000	16.856.975.500	652.125.000	607.901.000
4.	524115	254.700.000	229.520.000	25.200.000	25.200.000
5.	524119	4.855.804.000	4.809.196.640	518.160.000	508.744.000
Jumlah		39.738.770.000	38.393.763.107	4.691.609.000	4.391.208.639

*Belanja Perjalanan
Luar Negeri Rp0*

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.097.816.660. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 100,00 persen. Kondisi Pandemi COVID-19 bersifat global/mendunia hal ini menyebabkan banyak negara menutup gerbang kedatangan bagi pengunjung dari negara lain. Belanja Perjalanan Luar Negeri juga sangat dilarang untuk dilakukan, dikarenakan kekhawatiran atas penyebaran COVID-19.

*Belanja Modal
Rp18.045.219.699*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.045.219.699 dan Rp14.227.366.509. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Belanja Modal per Satker di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2020	% Angg
1	Komisi Aparatur Sipil Negara	6.916.738.000	6.758.985.387	97,72
2	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	11.349.908.000	11.286.254.332	99,44
Jumlah		18.266.646.000	18.045.219.699	98,79

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Perbandingan Rincian Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenalkan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.350.966.617	11.373.136.313	43,77
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.711.800	1.681.464.181	(83,66)
5361	Belanja Modal Lainnya	1.419.541.282	1.172.766.015	21,04
Jumlah Belanja Kotor		18.045.219.699	14.227.366.509	26,83
Pengembalian Belanja Modal		-	-	-
Jumlah Belanja Modal		18.045.219.699	14.227.366.509	26,83

Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 26,83 persen. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan fasilitas berupa perangkat keras (komputer, printer, meja kerja, dll) sangat dibutuhkan untuk

mengakomodir penambahan jumlah karyawan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibandingkan TA 2019, dikarenakan pada tahun tersebut disiapkan renovasi dan tata letak ruang kerja untuk mengakomodir tenaga kerja baru. Belanja Modal Lainnya merupakan belanja modal di luar klasifikasi Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jaringan, irigasi & jalan. Selain itu, dilakukan pengadaan Belanja Modal Lainnya, seperti pengadaan perangkat lunak (*software, operating system, anti virus, dsb*), pengembangan *website*, pengadaan lisensi (*zoom, mail service, dsb*).

Berikut perbandingan realisasi bruto dan neto atas Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Bruto dan Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019			%
		Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	Real. Bruto	P. Belanja	Real. Net.	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.350.966.617	-	16.350.966.617	11.373.136.313	-	11.373.136.313	43,77
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.711.800	-	274.711.800	1.681.464.181	-	1.681.464.181	(83,66)
5361	Belanja Modal Lainnya	1.419.541.282	-	1.419.541.282	1.172.766.015	-	1.172.766.015	21,04
Jumlah Belanja Modal		18.045.219.699	-	18.045.219.699	14.227.366.509	-	14.227.366.509	26,83

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp16.350.966.617

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.350.966.617 dan Rp11.373.136.313. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 43,77 persen. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan fasilitas

berupa perangkat keras (komputer, printer, meja kerja, dll) sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penunjang karyawan dalam melaksanakan tugas.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.658.556.367	11.373.136.313	37,68
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	692.410.250	0	100
Jumlah Belanja Kotor		16.350.966.617	11.373.136.313	43,77
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		16.350.966.617	11.373.136.313	43,77

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp274.711.800*

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp274.711.800 dan Rp1.681.464.181. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 83,66 persen. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibandingkan TA 2019, dikarenakan pada tahun tersebut disiapkan renovasi dan tata letak ruang kerja untuk mempersiapkan .

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.711.800	1.681.464.181	(83,66)
Jumlah Belanja Kotor		274.711.800	1.681.464.181	(83,66)
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		274.711.800	1.681.464.181	(83,66)

Rincian perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Akun	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Komisi Aparatur Sipil Negara	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	533111	275.000.000	274.711.800	-	-
Jumlah		275.000.000	274.711.800	-	-

Belanja Modal Lainnya
Rp1.419.541.282

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.419.541.282 dan Rp1.172.766.015. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 21,04 persen. Belanja Modal Lainnya merupakan belanja modal di luar klasifikasi Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jaringan, irigasi & jalan. Seperti pengadaan perangkat lunak (*software, operating system, anti virus, dsb*), pengembangan *website*, pengadaan lisensi (*zoom, mail service, dsb*). Kondisi Pandemi

COVID-19 menyebabkan penggunaan aplikasi zoom untuk melakukan *meeting* secara daring (*online*) menjadi rutin sehingga kebutuhan lisensi atas aplikasi tersebut meningkatkan realisasi dibandingkan TA sebelumnya.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Perbandingan Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi		% Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
530111	Belanja Modal Lainnya	1.320.865.782	1.172.766.015	12,63
530121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dan/Atau Aset	98.675.500	-	-
Jumlah Belanja Kotor		1.419.541.282	1.172.766.015	21,04
Pengembalian Belanja Modal Lainnya		-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya		1.419.541.282	1.172.766.015	21,04

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Rp7.393.337.919

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.393.337.919 dan Rp1.504.803.768. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara

Kas

Rp5.851.237.358

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.851.237.358 dan Rp23.771.608 atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.827.465.750 (24.514,39 persen). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara antara Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	5.837.398.036	14.651.808	39.741,35
Komisi Aparatur Sipil Negara	13.839.322	9.120.000	51,75
Jumlah	5.851.237.358	23.771.608	24.514,39

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

- Kas pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp13.839.322 terdiri dari Pengembalian Belanja Pegawai TAYL Tahun 2020 yang belum dijumlahkan dan baru disetorkan pada TA berikutnya sebesar Rp10.348.550, dan Pajak Bendahara Pengeluaran Komisi Aparatur Sipil Negara bulan Desember 2020 yang belum disetor sebesar Rp3.490.772.

- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebesar Rp5.837.398.036 terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp5.799.136.439 dan utang pajak sebesar Rp38.261.597. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara meningkat signifikan karena adanya permasalahan di *Cash Management System (CMS)* BRI sehingga mengakibatkan transaksi-transaksi pembayaran kepada pihak ketiga baru dibayarkan pada TA berikutnya.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan tempat penyimpanan adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Berdasarkan Tempat Penyimpanan per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang Tunai	13.839.322	9.120.000
Rekening Bank	5.837.398.036	14.651.608
Jumlah	5.851.237.358	23.771.608

Rekening tempat penyimpanan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PANRB dan saldonya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Perbandingan Saldo Pada Rekening Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Nama Satker	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	650304279501000	5.837.398.036
Komisi Aparatur Sipil Negara	650300154161000	0
Jumlah		5.837.398.036

Kedua rekening satker tersebut merupakan rekening *virtual account* dengan Nomor rekening Giro tingkat Kementerian PANRB 0193-01-003449-30-03 yang dibuka per Juni 2020 menggantikan rekening lama Satker Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor rekening masing-masing 019301003159306 dan 034101001655309.

Saldo rekening Giro tingkat Kementerian PANRB merupakan penjumlahan dari saldo rekening *virtual account* tingkat satker.

Tabel 57 Daftar Rekening Bendahara pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Saldo
1.	Rek Giro RKK	0193-01-003449-30-03	5.837.398.036
2.	Rek. VA Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	650304279501000	5.961.006.423
3.	Rek. VA Komisi Aparatur Sipil Negara	650300154161000	0
Selisih Lebih di Rek VA			(123.608.387)

Selisih antara Rekening Giro RKK dan Rekening *Virtual Account* (VA) sebesar Rp123.608.387 (selisih lebih pada Rek VA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 58 Penjelasan Selisih Rekening Giro RKK dan Rekening VA pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(dalam Rupiah)

No	Penyebab Selisih	Keterangan	Nominal
1	Transaksi Retur Klining dan Setor Tunai Giro RKK	36 Transaksi Klining dan 1 Transaksi Setor Tunai	82.847.887
2	Transaksi Pajak	1 Transaksi	94.090
3	Transaksi Rekon	4 Transaksi	(206.550.364)
Total Selisih pada Rek VA			(123.608.387)

Piutang Bukan Pajak
Rp126.920.264

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp126.920.264 dan Rp120.593.953. Peningkatan pada akun Piutang Lainnya sebesar Rp6.326.311 (5,25 persen). Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel 59 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
115212	Piutang Lainnya	126.920.264	120.593.953	5,25
	Jumlah	126.920.264	120.593.953	5,25

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian PANRB merupakan Piutang Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Piutang Lainnya Kementerian PANRB TA 2020 yang disetor TA 2021

(dalam Rupiah)

No	No. Dokumen	Tanggal Setor	Jenis Pengembalian	Nilai
1	4F1796U8E28TVA3K	13 Januari 2021	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.610.000
2	3DB098N3DN8KL1E5	15 Januari 2021	Sewa VPN	11.348.500
3	8CAEB3CIENEDFL7	20 Januari 2021	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.946.000
4	9787561QU7QM24CA	19 Maret 2021	Perjalanan Dinas SPM 02189 RBKunwas	207.147
5	EB32CB1QU7R1HQ1Q	1 April 2021	Perjalanan Dinas	182.500
6	37/KJ.02.02/2021	05 Januari 2021	Retur BRI TA 2020	104.628.117
	Jumlah			126.920.264

Semua saldo Piutang Lainnya merupakan saldo Piutang Lainnya yang terdapat pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Adapun mutasi piutang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 61 Mutasi Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	120.593.953
Mutasi Tambah:	
- Piutang Lainnya TA 2020	126.920.264
Mutasi Kurang:	
- Pelunasan Piutang Lainnya TA 2019	(120.593.953)
Saldo Per 31 Desember 2020	126.920.264

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Lancar
Rp634.600

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya yang terkategori sebagai Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp634.600 dan Rp602.970. Peningkatan pada akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya sebesar Rp31.630 (5,25 persen). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 62 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/turun (Penurunan)
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	634.600	602.970	5,25
	Jumlah	634.600	602.970	5,25

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan kategori

(dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang-Bukan Pajak			
Lancar	126.920.264	0,5	634.600
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang Lancar			634.600

Persediaan

Rp1.415.814.897

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.415.814.897 dan Rp1.361.041.177 atau mengalami peningkatan sebesar Rp54.773.720 (4,02 persen). Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akun

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
117111	Barang Konsumsi	1.129.474.018	1.179.791.063	(4,26)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	8.063.000	(100)
117114	Suku Cadang	14.945.000	14.276.666	4,68
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	46.354.000	100
117131	Bahan Baku	-	341.000	100
117199	Persediaan Lainnya	271.395.679	112.195.258	141,90
Jumlah		1.415.814.897	1.361.041.177	4,02

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 per satker sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker

(dalam Rupiah)

No	Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.312.199.877	1.225.282.927
2	Komisi Aparatur Sipil Negara	103.615.020	135.758.250
	Jumlah	1.415.814.897	1.361.041.177

Uraian persediaan per jenis persediaan per satker per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 66 Perbandingan Persediaan Per Jenis Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
117111	Barang Konsumsi	1.025.858.998	103.615.020
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
117114	Suku Cadang	14.945.000	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
117131	Bahan Baku	-	-
117199	Persediaan Lainnya	271.395.879	-
	Jumlah	1.312.199.877	103.615.020

Aset Tetap

Rp141.254.127.575

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp141.254.127.575 dan Rp101.136.991.425. Aset Tetap merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tanah

Rp32.784.833.000

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp32.784.833.000 dan Rp0. Penambahan Tanah terdapat pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor BAST BA-01/BMN.KASN/11/2020 dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 24 November 2020. Nilai BAST BMN sebesar Rp36.743.387.000 terdiri atas tanah sebesar Rp32.784.833.000, bangunan sebesar Rp3.939.906.000, dan bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp18.648.000.

Perbandingan Tanah per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 67 Perbandingan Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
131111	Tanah	32.784.833.000	0	100
	Jumlah	32.784.833.000	0	100

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Mutasi Aset tetap – Tanah

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2019	-
Mutasi Tambah	32.784.833.000
Transfer Masuk berupa Tanah (BAST: BA-01/BMN Komisi Aparatur Sipil Negara/11/2020)	32.784.833.000
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2020	32.784.833.000

Mutasi tambah berasal dari transfer masuk tanah dari KPK berdasarkan BAST No. BA-01/BMN.Komisī Aparatur Sipil Negara/11/2020, sebesar Rp32.784.833.000. Tidak terdapat mutasi kurang pada Aset Tetap – Tanah.

Peralatan dan Mesin
Rp124.345.957.662

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp124.345.957.662 dan Rp109.999.882.248 atau mengalami peningkatan sebesar Rp14.346.075.414 (13,04 persen). Rincian saldo Peralatan dan Mesin per satker yaitu sebagai berikut:

Tabel 69 Perbandingan Peralatan dan Mesin antara Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
132111	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	104.819.666.871	96.129.899.897	9,04
	Komisi Aparatur Sipil Negara	19.526.290.791	13.869.982.351	40,78
	Jumlah	124.345.957.662	109.999.882.248	13,04

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin selama TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 70 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	109.999.882.248
Mutasi Tambah	17.650.857.443
Pembelian	16.099.285.367
Hibah (Masuk)	919.669.544
Reklasifikasi Masuk	374.800.591

Perolehan Lainnya	101.994.000
Pengembangan Aset Langsung	155.107.100
Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra	841
Mutasi Kurang	3.304.782.029
Penghentian Penggunaan	2.986.390.088
Reklasifikasi Keluar	338.391.941
Jumlah Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Desember 2020	124.345.957.662

Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp16.099.285.367 terdiri dari:

Tabel 71 Pembelian Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Alat Banlu	12.331.000
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.120.700.000
Alat Bengkel Tak Bermesin	11.000.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.945.000
Alat Pengolahan	18.750.000
Alat Kantor	916.467.139
Alat Rumah Tangga	2.345.249.836
Alat Studio	1.004.902.500
Alat Komunikasi	325.143.200
Alat Kedokteran	45.895.000

Unit Alat Laboratorium	212.725.000
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.735.000
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	476.098.500
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.569.000
Alat Khusus Kepolisian	6.133.500
Komputer Unit	4.117.566.064
Peralatan Komputer	5.271.871.378
Alat SAR	109.870.250
Alat Kerja Penerbangan	20.800.000
Peralatan Olahraga	65.545.000
Jumlah	16.099.285.367

Hibah masuk sebesar Rp919.669.544 merupakan peralatan dan mesin yang berasal dari transaksi hibah dari lembaga dalam dan luar negeri, dengan Uraian sebagai berikut:

Tabel 72 Hibah Masuk

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Alat Angkutan Darat Bermotor	234.050.000
Alat Kantor	41.680.400
Alat Rumah Tangga	47.872.500
Alat Studio	23.892.000
Alat Komunikasi	4.535.000
Unit Alat Laboratorium	1.550.000

Komputer Unit	503.291.444
Peralatan Komputer	62.798.200
Jumlah	919.869.544

Reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp374.800.591 merupakan kesalahan pencatatan kodifikasi sub-akun Peralatan dan Mesin. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari transaksi reklasifikasi masuk terdiri dari:

Tabel 73 Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Jenis Peralatan	Sub Akun Sebelum Reklasifikasi	Sub Akun Setelah Reklasifikasi	Jumlah
Alat Kantor	11.186.318.397	11.222.727.047	36.408.650
Alat Rumah Tangga	22.762.025.899	23.062.488.039	300.462.140
Alat Kedokteran	286.526.539	289.172.539	2.646.000
Alat Kesehatan Umum	0	7.485.000	7.485.000
Komputer Unit	24.731.069.823	24.758.858.624	27.798.801
Jumlah	58.965.940.658	59.340.741.249	374.800.591

Peralatan dan Mesin dari Perolehan Lainnya sebesar Rp101.994.000 merupakan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang. Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang terdiri dari:

Tabel 74 Peralatan dan Mesin dari Perolehan Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Alat Kantor	29.988.000
Alat Rumah Tangga	48.106.000
Peralatan Komputer	23.900.000
Jumlah	101.994.000

Pengembangan Aset Langsung Peralatan dan Mesin merupakan Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian, namun tidak menambah NUP Peralatan Mesin. Pengembangan Aset Langsung Peralatan dan Mesin sebesar Rp155.107.100 terdiri dari:

Tabel 75 Pengembangan Nilai Aset Langsung

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Alat Rumah Tangga	9.348.000
Komputer Unit	70.179.100
Peralatan Komputer	75.580.000
Jumlah	155.107.100

Penghentian Penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.966.390.088 merupakan Peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dan direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya terdiri dari:

Tabel 76 Penghentian Aset Dari Penggunaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Alat Angkutan Darat Bermotor	383.829.000
Alat Kantor	69.747.322

Alat Rumah Tangga	368.957.038
Alat Studio	96.506.833
Alat Komunikasi	27.086.000
Komputer Unit	1.775.159.171
Peralatan Komputer	245.124.724
Jumlah	2.966.390.088

Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra adalah sebesar Rp841 sebagai berikut:

Tabel 77 Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Komputer Unit	841
Jumlah	841

Gedung dan Bangunan
Rp77.217.969.092

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp77.217.969.092 dan Rp72.771.604.892 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.446.364.200 (6,11 persen). Rincian Gedung dan Bangunan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Gedung dan Bangunan per Satker 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
133111	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	73.278.083.092	72.771.604.892	0,70

	Komisi Aparatur Sipil Negara	3.939.906.000	→	100
Jumlah		77.217.969.092	72.771.604.892	6,11

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 79 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	72.771.604.892
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	30.360.000
Pengembangan Nilai Aset	199.795.200
Perolehan Lainnya	3.939.906.000
Revaluasi	276.303.000
Jumlah Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	77.217.969.092

Terdapat Hibah Bangunan/Gedung yang dipisahkan dari Transfer Masuk Aset Instansi KPK dengan BAST Nomor BA-01/BMN.Komisi Aparatur Sipil Negara/11/2020 berdasarkan Surat KPKNL No. 376/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang menambahkan perihal pemisahan nilai Aset Gedung/Bangunan dari Transfer Masuk dengan nilai Rp3.939.906.000.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1.395.216.550

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.395.216.550 dan Rp1.395.216.550. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun adalah sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
134111	Jalan dan Jembatan	-	-	-
134113	Jaringan	1.395.216.550	1.395.216.550	-
	Jumlah	1.395.216.550	1.395.216.550	-

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 81 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Mertol Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.395.216.550	1.395.216.550
Komis Aparatur Sipil Negara	-	-
JUMLAH	1.395.216.550	1.395.216.550

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	1.395.216.550
Mutasi Tambah	-

Menferi Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		918.503.640
Komisi Aparatur Sipil Negara	750.160.587	200.991.485
Jumlah	750.160.587	1.119.495.125

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	1.066.687.595
Mutasi Tambah	52.807.530
Pembelian	52.807.530
Mutasi Kurang	-
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020	1.119.495.125

Mutasi Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Mutasi Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	976.356.902
Penyesuaian Pembangunan Langsung	188.787.665
Pembelian	786.569.237

Mutasi Kurang	225.196.315
Reklasifikasi Keluar	36.408.850
Transfer Keluar	188.787.865
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020	750.160.587

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp74.916.600

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp74.916.600 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. KDP merupakan kegiatan jasa konsultan perencanaan renovasi gedung Kementerian PANRB lantai 3.

Perbandingan KDP per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 87 Perbandingan KDP per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.916.600	-	100
	Jumlah	74.916.600	-	100

Rincian saldo KDP per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 88 Perbandingan KDP per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah Per 31 Desember 2020
Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	74.916.600

Komis Aparatur Sipil Negara	-
Jumlah	74.916.600

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 89 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi Tambah	74.916.600
Perolehan/Penambahan KDP	74.916.600
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2020	74.916.600

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp96.434.421.041

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp96.434.421.041 dan Rp84.096.399.860 atau mengalami peningkatan sebesar Rp12.338.021.181 (14,67 persen). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	86.708.701.969	78.398.689.409	13,15

137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.032.399.702	5.049.121.269	39,28
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	693.319.470	645.589.152	6,90
Jumlah		96.434.421.041	84.096.399.860	14,67

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker per 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Jumlah
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	79.065.292.972	6.993.000.642	693.319.470	86.751.613.084
Komisi Aparatur Sipil Negara	9.643.408.897	39.399.060	-	9.682.807.957
Jumlah	88.708.701.869	7.032.399.702	693.319.470	96.434.421.041

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp783.139.873

C.2.8. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp783.139.873 dan Rp783.412.600 atau mengalami peningkatan sebesar Rp272.727 (0,03 persen). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Rincian Tagihan TP/TGR yang diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Berdasarkan Akun

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	783.139.873	783.412.600	0,03
	Jumlah	783.139.873	783.412.600	0,03

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan piutang yang berasal dari Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang
Rp783.139.873

C.2.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp783.139.873 dan Rp783.412.600 atau mengalami penurunan sebesar Rp272.727 (0,03 persen). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Piutang Jangka Panjang berupa TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akunya disajikan sebagai berikut:

Tabel 93 Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Berdasarkan Akun

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
158311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	783.139.873	783.412.600	(0,03)
Jumlah		783.139.873	783.412.600	(0,03)

Piutang termasuk pada kategori macet berdasarkan Tabel 2, tentang kriteria piutang bahwa Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN, dalam hal ini KPKNL, maka dikategorikan sebagai piutang macet. Kronologis dan tahapan penyelesaian piutang TP a.n. Y.S dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai LK Kementerian PANRB TA 2015 (*Audited*), kerugian negara dari sisa Belanja Tunjangan Kinerja yang tidak disetorkan oleh Sdr. Y.S ke Kas Negara sebesar Rp853.876.643 dicatat sebagai Aset Lain-lain karena masih dalam proses penyelesaian TP/TGR dan mengurangi Beban Pegawai di Laporan Operasional Tahun 2015 (*Audited*).
2. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani Sdr. Y.S sebesar Rp853.876.643 dan yang bersangkutan telah menyanggupi akan segera mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja. Atas dasar SKTJM dimaksud, Kementerian PANRB melakukan reklasifikasi Aset Lain-lain menjadi Piutang TP sebesar Rp 853.876.643. Sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Y.S telah membayar piutang TP tersebut sebesar Rp14.619.814 sehingga piutang TP pada LK TA 2016 (*Audited*) tersaji sebesar Rp 839.256.829 dan keseluruhannya disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP.
3. BPK RI menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Sekretaris Menteri PANRB dengan Nomor Surat 28/S/MTP/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 hal Penyampaian Surat Keputusan Pembebanan.
4. Kementerian PANRB telah menyampaikan surat penagihan sebanyak tiga kali di TA 2018 kepada Sdr. Y.S terkait pelunasan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

- Surat tagihan pertama Nomor 74/KU/99/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Gaji.
 - Surat tagihan kedua Nomor 7/S.KU.02.02/2017 tanggal 11 September 2017 hal Surat Tagihan Kedua Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.
 - Surat tagihan ketiga Nomor B/15/S.KU.02.02/2017 tanggal 7 November 2017 hal Surat Tagihan Ketiga Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.
5. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S di TA 2017 adalah sebesar Rp22.183.363 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK TA 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp817.073.466. Piutang TP sebesar Rp817.073.466 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (7 November 2017) tidak dilakukan pelunasan, hal ini telah sesuai dengan PMK No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
 6. Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Kepada KPKNL Jakarta IV Up. Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta dengan Surat Nomor B/109/KU.02.00/2017 tanggal 11 Desember 2017 hal Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
 7. Sampai dengan 31 Mei 2018, pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S adalah sebesar Rp11.430.325.
 8. Kementerian PANRB, pada tanggal 26 Juni 2018, telah menerima surat dari Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta dengan nomor surat SP3N-3200/PUPNC.10.04/2018, hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga selanjutnya KPKNL yang akan mengurus Piutang TP atas Sdr. Y.S, tidak lagi penagihannya oleh satker pemilik piutang (Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara). Sesuai SP3N-3200/PUPNC.10.04/2018 tersebut, nilai piutang TP yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN KPKNL Jakarta IV adalah sebesar Rp805.643.141.
 9. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S pada Semester II 2018 adalah sebesar Rp21.412.360 sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp784.230.781. Piutang TP sebesar Rp784.230.781 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal ini telah sesuai dengan PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
 10. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp818.181 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp783.412.600. Piutang TP tersebut dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

11. Sdr. Y.S telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. KPKNL selaku pelaksana dalam hal pelunasan Piutang TP saudara Y.S masih mengupayakan penagihan untuk penyelesaian Piutang, komunikasi dengan pihak Kementerian PANRB dan belum ada tindakan lainnya selain penagihan untuk pelunasan Piutang TP terhadap saudara Y.S. sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp272.727 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp783.139.873 Piutang TP sebesar Rp783.139.873 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet.

Tabel 94 Penyetoran Pengembalian ke Kas Negara TP a.n Y.S

(dalam Rupiah)

No	NTPN	Tanggal Setoran	Nilai	Uraian
1	D91E561QTUAR3MKI	27/01/2020	90.909	Pembayaran a.n. Yusuf Sutendi KW-65 / 31-12-2019 (2018.06.003200)
2	A83C83CIEF2NUN53	30/06/2020	90.909	Pembayaran a.n. Yusuf Sutendi (2018.06.003200) KW -44/ 29/05/2020
3	2681655DE4DA8SL5	24/08/2020	90.909	Pembayaran a.n. Yusuf Sutendi (2018.06.003200) KW -41/ 30/06/2020

Aset Lainnya
Rp1.410.433.788

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.410.433.788 dan Rp1.356.599.426. Aset Lainnya merupakan Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Amortisasi atau Penyusutan dari Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud
Rp4.251.103.570

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp4.251.103.570 dan Rp4.214.073.020 atau mengalami peningkatan sebesar Rp37.030.550 (0,88 persen). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian perbandingan

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akunnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
162151	Software	3.907.743.570	4.041.813.020	(3,32)
162161	Lisensi	343.360.000	172.260.000	99,33
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Jumlah		4.251.103.570	4.214.073.020	0,88

Perbandingan Aset Tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 96 Perbandingan Aset Tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
162151	Software	2.239.273.100	1.668.470.470
162161	Lisensi	172.260.000	171.100.000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah		2.411.533.100	1.839.570.470

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	4.214.073.020
Mutasi Tambah	1.058.385.500
Koreksi Saldo Awal	459.500.000
Pembelian	345.355.500
Pengembangan Nilai Aset	82.430.000
Perolehan Lainnya	171.100.000
Mutasi Kurang	1.021.354.950
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.021.354.950
Saldo per 31 Desember 2020	4.251.103.570
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	3.053.120.585
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.197.982.985

Terdapat 3 aplikasi yaitu SIJAPTI, LAPOR, dan E-learning pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan penelusuran di lapangan hanya berumur 2 tahun lamanya, dimana pada aplikasi SAKTI Aset Tak Berwujud tercatat selama 4 tahun.

Aset Lain-Lain
Rp3.303.405.671

C.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp3.303.405.671 dan Rp2.572.608.800 atau mengalami peningkatan sebesar Rp730.396.871 (28,41 persen). Aset Lain-lain terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan juga aset lain-lain yang dimiliki entitas. Rincian Aset Lain-lain per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Aset Lain-lain per Akun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
166111	Aset Lain-lain	-	-	-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.120.855.671	2.572.608.800	21,31
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	182.550.000	-	100
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-
Jumlah		3.303.405.671	2.572.608.800	28,41

Perbandingan Aset Lain-lain per Satker per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 99 Perbandingan Aset Lain-lain per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
166111	Aset Lain-lain	-	-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.099.714.171	21.141.500
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	182.550.000	-
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-
Jumlah		3.282.264.171	21.141.500

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Urutan	Jumlah
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.572.608.800
Mutasi Tambah	3.987.745.038
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.987.745.038
Mutasi Kurang	3.266.948.167
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	45.108.900
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	3.211.839.367
Saldo per 31 Desember 2020	3.303.405.671
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	3.267.873.618
Nilai Buku per 31 Desember 2020	35.532.053

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp6.144.075.453

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp6.144.075.453 dan Rp5.430.082.394 atau mengalami peningkatan sebesar Rp713.993.059 (13,15 persen). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.090.954.868	2.555.893.000	20,94
169315	Akumulasi Amortisasi Software	2.841.807.835	2.865.776.394	(0,84)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	34.394.000	8.613.000	299,33
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	176.918.750	-	100
Jumlah		6.144.075.453	5.430.082.394	13,15

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek
Rp6.346.725.175

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.346.725.175 dan Rp536.304.891. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp6.304.972.806

C.4.1 Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar/Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.304.972.806 dan Rp533.790.332 atau mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.771.182.474 (1.081,17 persen) karena adanya saldo pada akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp5.903.764.556. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Perbandingan Rincian Belanja yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akun

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	120.146.000	208.168.000	(42,28)
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	281.062.250	325.622.332	(13,68)
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
212101	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	5.903.764.556	-	100
Jumlah		6.304.972.806	533.790.332	1.081,17

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan Hutang Belanja Uang Makan PNS Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan pada TA berjalan sebesar Rp120.146.000 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) dan akan dibayarkan pada TA berikutnya dengan penjumlahan pada Buku Besar GLP-427950-12744277 tanggal 31 Desember 2020.
- Belanja Barang yang masih harus dibayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 103 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Satker	Nilai
1	Beban Langganan Listrik Desember 2020	Mentan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	142.853.818
2	Beban Langganan Telepon Desember 2020	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	6.910.746
3	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat yang masih harus dibayar 2020	Komisi Aparatur Sipil Negara	25.203.000
4	Beban Langganan Telepon Desember 2020	Komisi Aparatur Sipil Negara	455.548
5	Beban Langganan Listrik Desember 2020	Komisi Aparatur Sipil Negara	101.349.680

6	Beban Langganan Listrik Desember 2020 Kantor KASN Gedung Cipinang	Komisi Aparatur Sipil Negara	289.360
7	Beban Langganan Listrik November 2020 Kantor KASN Gedung SMESCO	Komisi Aparatur Sipil Negara	2.017.016
8	Beban Langganan Listrik Desember 2020 Kantor KASN Gedung SMESCO	Komisi Aparatur Sipil Negara	1.983.283
Jumlah			281.062.250

- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp5.903.764.556 terdiri dari: Retur BRI dari hasil pemeriksaan sebesar Rp104.628.117 dengan penjumlahan Kode Buku Besar GLP-427950-13583840 dan GLP-427950-13590287, sehingga menyisakan pembayaran kepada PPK/pihak ketiga adalah sebesar Rp5.799.136.439 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 104 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Nilai
1	Biro SDM dan Umum-Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.992.222.930
2	Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	1.338.734.083
3	Kedeputan Bidang Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas	1.835.112.575
4	Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Satker MENPAN	70.640.200
5	Kedeputan Bidang Pelayanan Publik	251.654.522
6	Inspektorat MENPAN	4.309.091
7	Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	361.579.346
8	Biro Manajemen Perencanaan Kinerja dan Organisasi	16.478.483
9	Transaksi MPN Satker KASN	3.500.000
10	Biaya Admin CMS	130.000
11	Rekonsiliasi Kredit BRI	(108.113.864)
12	Saldo Akhir	11.647.500
13	Pengambilan Tunai	59.503.170
14	Pajak dan Transaksi Pembayaran	(38.261.597)
TOTAL		5.799.136.439

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp41.752.369

C.4.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp41.752.369 dan Rp2.514.559 atau mengalami peningkatan sebesar Rp39.237.810 (1.560,43 persen). Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Negara.

Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 105 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
219901	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	41.752.369	2.514.559	1.560,43
Jumlah		41.752.369	2.514.559	1.560,43

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Satker	31 Desember 2020
219901	Menteri Negara-Pendayagunaan Aparatur Negara	38.261.597
	Komisaris Aparatur Sipil Negara	3.490.772
Jumlah		41.752.369

Ekuitas
Rp143.711.174.107

C.5 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp143.711.174.107 dan Rp103.462.089.728. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut mengenai Ekuitas disajikan dalam CaLK bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Defisit dari Kegiatan
Operasional
Rp207.047.950,107*

D.1 Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp207.047.950,107 dan Rp325.018.771,111 atau mengalami penurunan sebesar Rp117.970.821,004 (36,30 persen). Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pendapatan dan beban yang dilaksanakan secara normal oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pos Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional

*Pendapatan
Operasional Rp0*

D.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.391.213 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.391.213 (100 persen). Pendapatan Operasional Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Pendapatan PNBP
Rp0*

D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan PNBP pada Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.391.213 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 107 Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.044.994	(100,00)
425991	Penerimaan Kembali Persekol/Uang Muka Gaji	-	346.219	(100,00)
Jumlah		-	2.391.213	(100,00)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.391.213. Hal ini disebabkan antara lain dengan nihilnya denda atas pihak ketiga yang didapatkan di tahun 2019 akibat pelanggaran kontrak maupun kesalahan perhitungan Persekot/Uang Muka Gaji.

Adapun perbandingan Pendapatan PNBPN pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Perbandingan Pendapatan PNBPN pada LRA dan LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Penyesuaian	Pendapatan LO
Jumlah Pendapatan	277.526.891	277.526.891	-

Pendapatan pada Tahun 2020 merupakan pendapatan yang tidak dianggarkan/direncanakan, dikarenakan pendapatan tersebut merupakan Pengembalian dari Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang baru dikembalikan pada TA 2020.

Rincian Pendapatan per Akun untuk periode berakhir 31 Desember 2020 diuraikan, pada Tabel berikut:

Tabel 109 Rincian Pendapatan PNBPN Per Akun LRA 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Nilai
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	82.121.212
425701	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	12.798.000
425702	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	272.727
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	40.483.950
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	141.851.002
JUMLAH		277.526.891

Beban Operasional
Rp207.047.950,107

D.1.2 Beban Operasional

Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp207.047.950,107 dan Rp325.021.162,324 atau mengalami penurunan sebesar Rp117.973.212,217 (36,30 persen) yang meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban

Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Beban Pegawai
Rp79.901.266,114

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.901.266,114 dan Rp83.570.982.254. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Rincian perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 110 Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	23.157.184.647	20.457.864.730	13,20
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	359.535	306.100	17,45
511121	Beban Tunjangan Suami Istri PNS	1.223.712.884	1.218.639.112	0,42
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	318.475.264	321.730.057	(1,01)
51112	Beban Tunjangan Struktural PNS	3.114.805.000	3.403.650.540	(8,49)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	545.585.000	286.310.000	90,56
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	155.336.836	196.096.540	(20,79)

511126	Beban Tunjangan Beras PNS	942.111.780	906.511.000	3,93
511129	Beban Uang Makan PNS	3.946.915.450	3.153.300.150	25,17
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	772.900.000	757.160.000	2,08
512111	Beban Uang Honor Tetap	6.081.790.449	6.754.213.042	(9,96)
512211	Beban Uang Lembur	289.729.000	562.605.000	(48,50)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	39.364.749.333	45.552.795.973	(13,58)
Jumlah Kotor		79.913.655.181	83.570.982.254	(4,38)
Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		(12.389.067)	(18.424.162)	-
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		79.901.266.114	83.552.558.092	(4,37)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.651.291.978 (4,37 persen). Hal ini disebabkan antara lain penurunan signifikan terjadi pada Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) penyesuaian *grade* jabatan dan perhitungan kinerja pegawai pada TA 2020 menjadi sumber utama dari penurunan jika dibandingkan TA 2019. Perubahan Struktur Jabatan dari sebelumnya mengacu dengan Jabatan Struktural tergantikan dengan struktur Jabatan Fungsional, juga mempengaruhi pos-pos di atas. Jumlah Beban Pegawai per akun menunjukkan angka Rp79.913.655.181 setelah dikurangi Pengembalian Belanja Pegawai pada tahun berjalan sejumlah Rp12.389.067 maka didapatkan nilai Beban Pegawai pada LO sebesar Rp79.901.266.114.

Adapun perbandingan belanja pegawai di LRA dengan Beban Pegawai di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 111 Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
511111	Beban Gaji Pokok PNS	23.157.184.847	-	23.157.184.847
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	359.538	-	359.538
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	1.223.712.884	-	1.223.712.884
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	318.475.264	-	318.475.264
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	3.114.805.000	-	3.114.805.000
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	545.585.000	-	545.585.000
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	155.336.836	-	155.336.836
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	942.111.780	-	942.111.780
511129	Beban Uang Makan PNS	4.045.286.000	(98.370.550)	3.946.915.450
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	772.900.000	-	772.900.000
512111	Beban Uang Honor Tetap	6.081.790.449	-	6.081.790.449
512211	Beban Uang Lembur	289.729.000	-	289.729.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	39.364.749.333	-	39.364.749.333
Jumlah Kotor		80.012.026.731	(98.370.550)	79.913.656.181
Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		(12.389.067)		(12.389.067)
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		79.999.636.664	(98.370.550)	79.901.266.114

Terdapat penyesuaian sebesar (Rp98.370.550) dengan penambahan Beban Uang Makan periode Desember 2020 Kementerian PANRB yang masih harus dibayarkan pada TA berikutnya. Rincian atas Selisih Belanja Pegawai di LRA dan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Selisih Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
A	Beban Pegawai LO	79.901.266.114
B	Belanja Pegawai LRA	79.999.636.664
	Selisih Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai LRA	(98.370.550)
	Faktor yang mempengaruhi	
C	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(218.515.550)
D	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	120.146.000
E	Jumlah Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Pegawai	-
F	Jumlah Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	-
G	Beban Pegawai Total = b - c + d - e - f	79.901.266.114
	Selisih (a - g)	-

Rincian atas Selisih Belanja Pegawai per Satker pada Kementerian PANRB dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Pengembalian Uang Makan PNS Per Satker Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Satker	Nilai
511129	Pengembalian Uang Makan PNS	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	88.022.000
		Komisai Aparatur Sipil Negara	10.348.550
JUMLAH			98.370.550

Beban Persediaan
Rp5.051.886.631

D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.051.886.631 dan Rp4.742.766.436. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir periode akuntansi Beban Persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

Rincian perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 114 Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
593111	Beban Persediaan konsumsi	4.031.037.285	4.493.349.451	(10,29)
593131	Beban Persediaan bahan baku	341.000	-	-
593140	Beban Persediaan Lainnya	1.020.508.346	249.416.985	309,16
	Jumlah	5.051.886.631	4.742.766.436	6,52

Berdasarkan tabel di atas, Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp309.120.195 (6,52 persen) bila dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain peningkatan pemakaian barang persediaan pada TA 2020, dikarenakan jumlah pegawai yang juga meningkat.

Perbandingan LRA dan LO untuk Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 115 Perbandingan LRA dan LO untuk Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
593111	Beban Persediaan Konsumsi	4.123.089.478	(92.052.193)	4.031.037.285
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	-	341.000	341.000
593149	Beban Persediaan Lainnya	-	1.020.508.346	1.020.508.346
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	1.188.211.624	(1.188.211.624)	-
Jumlah		5.311.301.102	(259.414.471)	5.051.886.631

Penyesuaian sebesar Rp259.414.471 merupakan selisih antara penggunaan persediaan yang sudah digunakan dengan yang masih tersisa pada gudang persediaan.

Perbandingan Beban Persediaan per Satker untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2020 dan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Perbandingan Beban Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
593111	Beban Persediaan Konsumsi	3.532.497.668	498.539.617
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	341.000	-
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.020.508.346	-
Jumlah		4.553.347.014	498.539.617

Beban Barang dan
Jasa
Rp53.173.111.500

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp53.173.111.500 dan Rp98.265.690.901. Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa serta Beban Aset Ekstrakomptabel. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, sementara Beban Aset Ekstrakomptabel

merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 117 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/turun (Penurunan)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	7.375.038.247	4.735.111.212	55,75
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	300.000	-	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	442.849.688	633.089.382	(30,05)
521115	Beban Honor Operasional Satuan/Unit Kerja	758.820.000	782.430.000	(3,02)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2.526.623.346	2.143.400.062	17,88
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	644.792.048	-	-
521211	Beban Bahan	6.450.790.670	14.650.437.026	(56,97)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	605.840.000	1.856.479.000	(67,36)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.684.514.000	4.682.307.036	(64,02)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	162.631.000	-	-

522111	Beban Langganan Listrik	2.511.391.171	2.744.821.635	(8,50)
522112	Beban Langganan Telepon	88.512.935	123.858.810	(28,54)
522113	Beban Langganan Air	1.619.095	12.195.739	(86,72)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.685.774.554	1.515.415.960	11,24
522131	Beban Jasa Konsultan	2.834.698.980	19.200.836.010	(85,23)
522141	Beban Sewa	3.630.817.725	2.985.298.581	21,58
522151	Beban Jasa Profesi	7.072.490.833	9.632.905.000	(26,58)
522191	Beban Jasa Lainnya	11.151.029.491	32.030.687.772	(65,83)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.483.478.976	-	-
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	62.898.741	158.793.180	(60,39)
Jumlah Kotor		53.174.711.500	98.489.075.425	(46,00)
Pengembalian Beban Barang dan Jasa		(1.600.000)	(223.384.524)	-
Jumlah		53.173.111.500	98.265.690.901	(45,89)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp45.092.579.401 (45,89 persen) bila dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kondisi Pandemi COVID-19 menyebabkan penghematan pada anggaran sehingga penurunan beban dari Belanja Barang cukup signifikan.

Adapun perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan Beban Barang dan Jasa di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 118 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	7.373.792.823	1.245.424	7.375.038.247
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	300.000	-	300.000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	417.646.688	25.203.000	442.849.688
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	758.820.000	-	758.820.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2.526.623.346	-	2.526.623.346
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	649.203.792	(4.411.744)	644.792.048
521211	Beban Bahan	6.448.936.860	1.653.820	6.450.790.670
521213	Beban Honor Output Kegiatan	605.640.000	-	605.640.000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.684.514.000	-	1.684.514.000
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	162.631.000	-	162.631.000
522111	Beban Langganan Listrik	2.579.086.046	(67.896.875)	2.511.391.171
522112	Beban Langganan Telepon	90.579.142	(2.066.207)	88.512.935
522113	Beban Langganan Air	1.619.095	-	1.619.095

522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.685.774.554	-	1.685.774.554
522131	Beban Jasa Konsultan	2.834.069.000	629.980	2.834.698.980
522141	Beban Sewa	3.642.154.225	(11.345.500)	3.630.817.725
522151	Beban Jasa Profesi	5.261.145.000	1.811.345.833	7.072.490.833
522191	Beban Jasa Lainnya	10.769.770.165	381.259.326	11.151.029.491
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.294.824.809	(1.811.345.833)	3.483.478.976
985112	Beban Aset Ekstrakomputer Peralatan dan Mesin	-	62.898.741	62.898.741
Jumlah Kotor		52.787.142.535	387.568.965	53.174.711.500
Pengembalian Beban Barang dan Jasa		(1.600.000)		(1.600.000)
Jumlah		52.785.542.535	387.568.965	53.173.111.500

Terdapat nilai pengembalian pada Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp1.600.000 dan penyesuaian sebesar Rp387.568.965 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 119 Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO
31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Selisih Beban Keperluan Perkantoran Pengembalian Belanja dan Koreksi Jurnal pembebanan Beban Keperluan Perkantoran (521111)	1.245.424
2	Selisih Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Koreksi Jurnal Aktual Pengakuan Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara	25.203.000

3	Selisih Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Koreksi Jurnal pembebanan Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 ke Belanja Bahan (521211)	(4.411.744)
4	Selisih Belanja Bahan Koreksi SPM/SP2D Jurnal pembebanan Beban Barang Operasional	1.853.820
5	Selisih Beban Langganan Listrik Jurnal Balik/Penambahan Beban Atas Tagihan Listrik Desember 2020 yang masih harus dibayar pada Tahun Anggaran Berikutnya	(67.696.875)
6	Selisih beban langganan telepon Jurnal Balik/Penambahan Beban Atas Tagihan Telepon Desember 2020 yang masih harus dibayar pada Tahun Anggaran Berikutnya	(2.066.207)
7	Selisih Beban Jasa Konsultan Hibah Langsung Jasa Konsultan sesuai BAST No.602/TRANSFORMASI.BR/Yanik/JASA-2020 Tgl-23 Desember 2020 Rp1.651.299.195 Hibah Langsung Berubah Jasa sesuai BAST No.129/KS.01/2020 Tanggal 24 November 2020, Depdik Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Rp2.303.677.484	629.980
8	Selisih Beban Sewa Pengembalian Sewa Koreksi VPN Bulan Desember 2020 (522141)	(11.346.500)
9	Selisih Beban Jasa Profesi Koreksi Jurnal pembebanan Jasa Profesi (522151)	1.811.345.833
10	Selisih Beban Jasa Lainnya (522191) Pendapatan Hibah Langsung diterima Sakder Komisi Aparatur Sipil Negara BAST No. 140/USAID-INA/BAST-Service/ORG tanggal 14 Juli 2020 Rp2.711.320.545 BAST No. 241/USAID-INA/BAST- Service/DRG tanggal 25 November 2020 Rp381.259.326 BAST No. 07/HIBAH.DFAT/Komisi Aparatur Sipil Negara/XII/2020 tanggal 18-Desember 2020 Rp418.793.726	381.259.326
11	Selisih Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(1.811.345.833)

	Koreksi Jumlah pembebanan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19 ke beban jasa profesi (522151)	
12	Selisih Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya di bawah batas kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	62.898.741
Jumlah		387.568.965

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp10.008.046.939

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.008.046.939 dan Rp9.568.926.535. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 120 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.472.980.718	4.153.490.609	7,69
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.997.006.165	4.932.332.430	1,31
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.157.320	284.492.010	12,89

503113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	237.685.100	196.409.000	21,02
503114	Beban Persediaan suku cadang	2.517.656	2.202.488	14,31
Jumlah Kotor		10.031.346.959	9.568.926.535	4,83
Pengembalian Beban Pemeliharaan		(23.300.000)	-	-
Jumlah		10.008.046.959	9.568.926.535	4,59

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp439.120.424 (4,59 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Adapun perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dengan Beban Pemeliharaan di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 121 Perbandingan Beban Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan Neto di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.535.378.718	(62.998.000)	4.472.990.718
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	11.850.000	(11.850.000)	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.003.856.165	(6.850.000)	4.997.006.165
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	516.157.320	(195.000.000)	321.157.320
503113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	237.685.100	237.685.100
503114	Beban Persediaan suku cadang	-	2.517.656	2.517.656
Jumlah Kotor		10.067.242.203	(35.895.244)	10.031.346.959
Pengembalian Beban Pemeliharaan		(23.300.000)		(23.300.000)
Jumlah		10.043.942.203	(35.895.244)	10.008.046.959

Tabel 122 Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Selisih Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan Merupakan Hasil Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(62.398.000)
	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(96.604.000)
	Koreksi SPM SP2D pada Belanja Pemeliharaan di Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	26.856.000
	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada satker Komisi Aparatur Sipil Negara	6.850.000
	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 pada satker Komisi Aparatur Sipil Negara	500.000
2	Selisih dari Koreksi SPM dari Belanja Penanganan COVID menjadi Belanja Biasa (Non-Covid)	(11.850.000)
	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID 19 ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Satker Komisi Aparatur Sipil Negara	(11.850.000)
3	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Beban	(6.850.000)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - satker Komisi Aparatur Sipil Negara	
	Selisih dari Koreksi SPM Koreksi SPM dan SP2D dari Akun satu ke lainnya (523121)	16.450.000
	Pengembalian Belanja pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(23.300.000)
4	Selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129)	(195.000.000)
	Koreksi tambah atas aset peralatan dan mesin yang belum tercatat pada Neraca – Satker Komisi Aparatur Sipil Negara	(23.900.000)
	Koreksi kurang atas Beban Pemeliharaan (LO) akibat transaksi Belanja Barang yang menghasilkan Lisensi dengan masa penggunaan 2 tahun	(171.100.000)
5	Selisih Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Merupakan Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di LO dan tidak ada di LRA.	237.685.100
	Merupakan Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di LO dan tidak ada di LRA – Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	229.602.100
	Merupakan Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di LO dan tidak ada di LRA – Satker Komisi Aparatur Sipil Negara	8.083.000
6	Selisih Beban Persediaan Suku Cadang	2.517.656

Merupakan pemakaian persediaan untuk suku cadang selama TA 2020 atas Belanja Barang persediaan. Beban ini hanya ada di LO dan tidak ada di LRA	
Merupakan pemakaian persediaan untuk suku cadang selama TA 2020 atas Belanja Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di LO dan tidak ada LRA – Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.517.656
TOTAL SELISIH	(35.895.244)

Beban Perjalanan Dinas
Rp42.774.208.599

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp42.774.208.599 dan Rp112.782.810.008. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 123 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% KENAIKAN (PENURUNAN)
524111	Beban Perjalanan Biasa	20.053.154.149	51.726.370.488	(59,74)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	431.040.000	1.318.350.000	(67,30)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.456.495.500	34.336.840.254	(49,15)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	254.720.000	-	-

524110	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.315.940.640	17.625.335.500	(69,84)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	10.268.081.034	(100,00)
Jumlah Kotor		43.511.350.289	115.274.957.274	(62,26)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas		(737.141.690)	(2.492.147.266)	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		42.774.208.599	112.782.810.008	(62,07)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp70.008.601.409 (62,07 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan Kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global membatasi kegiatan-kegiatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain itu, terdapat pengembalian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 pada Beban Perjalanan Biasa sebesar Rp734.966.690 dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp2.175.000.

Adapun perbandingan belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan Beban Perjalanan Dinas di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 124 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
524111	Beban Perjalanan Biasa	20.053.381.296	(207.147)	20.053.154.149
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	431.040.000	-	431.040.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.467.051.500	(10.555.000)	17.456.495.500
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	254.720.000	-	254.720.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.315.940.640	-	5.315.940.640

Jumlah Kotor	43.522.113.436	(10.763.147)	43.551.350.289
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(737.141.690)		(737.141.690)
Jumlah Beban Perjalanan Biasa	42.784.971.746	(10.763.147)	42.774.208.599

Tabel 125 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas per Satker

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Minteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
524111	Beban Perjalanan Biasa	16.869.403.996	3.383.750.153
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	353.640.000	77.400.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.848.594.500	607.901.000
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	229.520.000	25.200.000
524110	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.809.195.640	508.744.000
Jumlah Bruto		38.910.355.136	4.600.995.153
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas		627.355.176	209.786.514
Jumlah		38.382.999.960	4.391.208.639

Terdapat penyesuaian pada Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan Pengembalian Belanja Akun masing-masing pada TA Berjalan ditambahkan dengan Pengembalian Belanja TAYL.

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp16.138.795.704

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.138.795.704 dan Rp16.089.986.190. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan penyusutan masing-masing jenis Aset Tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 126 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.227.470.601	13.554.822.651	(2,42)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.962.566.230	1.914.192.445	2,53
591313	Beban Penyusutan Jaringan	44.730.288	44.730.288	-
592115	Beban Amortisasi Software	653.701.391	561.696.706	51,99
592116	Beban Amortisasi Lisensi	25.761.000	8.613.000	199,33
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.631.250	-	-
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	18.915.544	5.931.100	216,92
Jumlah		16.138.795.704	16.089.986.190	0,30

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp48.809.514 (0,30 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Kemudian data di bawah ini merupakan perbandingan beban penyusutan antara Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara:

Tabel 127 Perbandingan Beban Penyusutan per Salikat

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan	Komisi Aparatur Sipil Negara
501111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.561.017.822	2.666.452.179
501211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.923.167.170	39.399.060
501313	Beban Penyusutan Jaringan	44.790.288	-
502115	Beban Amortisasi Software	508.213.750	345.487.641
502116	Beban Amortisasi Lisensi	17.226.000	8.555.000
502118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.631.250	-
502222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17.460.558	1.454.966
Jumlah		13.077.446.838	3.061.348.866

D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp634.600

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp634.600 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Rincian perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 128 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	907.327	-	-
594031	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbandahanari/ Tuntutan Ganti Rugi	(272.727)	-	-
Jumlah		634.600	-	100

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan pembayaran atas Piutang TP dari saudara Y.S disetorkan oleh pihak KPKNL sebesar Rp 272.727.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp211.679.169

D.2 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp211.679.169 dan Rp407.836.725. Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjumlahan antara Defisit Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Defisit Pelepasan
Aset Non Lancar
(Rp9.895.788)

D.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari pendapatan dan beban pelepasan yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Kementerian PANRB melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi Aset Non Lancar tersebut. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar Rp9.895.788 dan surplus sebesar Rp31.306.256.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp9.895.788 berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp82.121.212 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp92.017.000.

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp82.121.212

D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.121.212 dan Rp36.123.456. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut terjadi ketika pendapatan

yang diterima dari Pelepasan Aset Non Lancar (penghapusan) lebih besar dari nilai buku Aset Non Lancar yang dilepas.

Rincian perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 129 Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan (Penurunan)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	82.121.212	-	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	36.123.456	(100)
Jumlah		82.121.212	36.123.456	127,33

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp45.997.756 (127,33 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Lelang dari Aset yang sudah dipersiapkan pengantiannya dan berstatus rusak berat dihapuskan dari pembukuan. Adapun perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LRA dengan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 130 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar di LRA dan LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Pendapatan LRA	Penyesuaian	Pendapatan LO
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	82.121.212	82.121.212
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	82.121.212	(82.121.212)	-
Jumlah		82.121.212	-	82.121.212

Telah dilakukan reklasifikasi akun Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya menjadi Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin pada LO. Tidak terdapat penyesuaian

pada Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LRA sama dengan pada LO.

*Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp92.017.000*

D.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp92.017.000 dan Rp4.817.200. Beban Pelepasan Aset Non Lancar tersebut terjadi ketika Aset Non Lancar diserahkan secara sukarela kepada Pemda atau masyarakat tanpa adanya kompensasi yang diterima dan usulan serta penghapusan Aset Non Lancar yang dinyatakan rusak berat atau hilang. Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.810,18 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset (Akun 596111). Beban ini hanya muncul pada LO yang didukung dengan laporan BMN dan tidak ada di LRA.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp221.574.957*

D.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 221.574.957 dan Rp376.530.469.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp221.574.957 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp332.884.395 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp111.309.438.

D.2.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp332.884.395*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp332.884.395 dan Rp508.606.554.

Rincian perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 131 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
425701	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	12.798.000	-	-
425702	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	40.483.950	21.599.838	87,43
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	132.731.002	212.877.104	(37,65)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
491420	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	-	-	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	146.871.443	274.129.612	(46,42)
Jumlah		332.884.395	508.606.554	(34,55)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp175.722.159 (34,55 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Adapun perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 132 Perbandingan Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Pendapatan LRA	Penyesuaian	Pendapatan LO
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	12.798.000	-	12.798.000
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	272.727	(272.727)	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	40.483.950	-	40.483.950
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	141.851.002	(9.120.000)	132.731.002
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	146.871.443	146.871.443
	Jumlah	195.405.679	137.478.716	332.884.395

Terdapat penyesuaian sebesar Rp137.478.716 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rp272.727 selisih dikarenakan *mapping* pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara untuk Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
2. Rp9.120.000 selisih dikarenakan *mapping* pendapatan dari pengembalian Belanja Barang TAYL, kegiatan Non Operasional.
3. Rp146.871.443 Selisih Angka dan akun ini muncul dikarenakan pada Laporan Operasional akibat penerapan metode harga perolehan terakhir

D.2.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp111.309.438*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp111.309.438 dan Rp132.076.085.

Rincian perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 133 Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	111.309.438	132.076.085	(15,72)
	Jumlah	111.309.438	132.076.085	(15,72)

Berdasarkan tabel di atas, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.766.647 (15,72 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Angka dan akun ini muncul dikarenakan pada Laporan Operasional akibat penerapan metode harga perolehan terakhir, jika terdapat perbedaan antara harga perolehan sebelumnya dengan yang terakhir (dikarenakan perubahan harga barang tersebut) maka selisih antara harga tersebut membentuk akun penyesuaian nilai persediaan.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya akun 593311 dan 596121 hanya muncul pada LO yang didukung dengan laporan persediaan dan tidak ada di LRA.

Tabel 134 Belanja LRA dan Beban LO Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	111.309.438	111.309.438
	Selisih ini hanya muncul pada Laporan Operasional akibat penerapan Metode Perolehan Harga Terakhir			
	Jumlah	-	111.309.438	111.309.438

Surplus (Defisit) LO
Rp206.836.270.938

D.3. Surplus (Defisit) - LO

Surplus (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar Rp206.836.270.938 dan Rp324.610.934.386. Pos Surplus (Defisit) - LO adalah penjumlahan dari Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus sebelum dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian perbandingan Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 135 Perbandingan Rincian Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(207.047.950.107)	(325.016.771.111)	(36,29)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	211.679.169	407.836.725	(48,10)
Surplus/Defisit LO	(206.836.270.938)	(324.610.934.386)	(36,28)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp103.462.089.728

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp103.462.089.728 dan Rp72.568.082.080. Nilai Ekuitas Awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

Defisit-LO
Rp206.836.270.938

E.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit masing-masing sebesar Rp206.836.270.938 dan Rp324.610.934.386. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Koreksi Yang Menambah Ekuitas
(Rp6.777.940.137)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp6.777.940.137. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah Koreksi yang menambah Ekuitas sebesar Rp33.116.428.291. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian		Nilai
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar (a+b+c+d+e+f)		(6.777.940.137)
a	Penyesuaian Nilai Aset	0
b	Koreksi Nilai Persediaan	0
c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0
d	Selisih Revaluasi Aset	276.303.000
e	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(96.796.826)
f	Koreksi Lain-lain	(6.957.446.275)

Selisih Revaluasi Aset
(Rp276.303.000)

E.3.1 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset adalah Selisih Revaluasi Aset Tetap (391114) yang merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp276.303.000 dan Rp34.454.731.394. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air. Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp276.303.000 yang seluruhnya terdapat pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang diketahui dari proses koreksi revaluasi pada aplikasi SAKTI Modul Aset pada bulan Desember 2020 dengan nomor surat BAR-0443/REV/WKN.07/KNL.05/2020.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
(Rp96.796.862)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (3911) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah koreksi kurang sebesar Rp96.796.862 dan Rp1.342.690.177. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan akumulasi yang mencatat segala koreksi nilai yang terjadi pada aset non revaluasi.

E.3.2.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Lainnya Tetap Non
Revaluasi
(Rp39.359.362)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah koreksi kurang masing-masing sebesar Rp39.359.362 dan Rp1.342.690.177. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset tetap yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset
Lainnya Tetap Non
Revaluasi
(Rp57.437.500)

E.3.2.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp57.437.500 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 137 Rincian Akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Koreksi		Total
		Tambah	Kurang	
1	Jurnal Penyesuaian Hibah lainnya atas Koreksi kurang atas hibah jasa TAYL yang dicatat sebagai beban akrual di LO – Satker Komisi Aparatur Sipil Negara	-	57.437.500	(57.437.500)
JUMLAH				(57.437.500)

Koreksi Lainnya
(Rp6.957.446,275)

E.3.3 Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya (391119) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp6.957.446.275) dan Rp4.387.074. Koreksi Lainnya merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, Piutang dan Utang.

Tabel 138 Rincian Akun Koreksi Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Koreksi		Total
		Tambah	Kurang	
1	Jurnal Balik piutang lainnya atas pengembalian belanja TA 2019 yang disetor TA 2020 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	120.593.953	(120.593.953)
2	Jurnal penyesuaian pendapatan TGR TA 2020 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	272.727	-	272.727
3	Jurnal balik Kas Lainnya pengembalian belanja Perજાતાન Dinas TA 2019 yang disetor TA 2020 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	12.137.049	(12.137.049)
4	Jurnal balik Penyisihan Piutang lainnya atas pengembalian belanja TA 2019 yang disetor TA 2020 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	602.970		602.970
5	Jurnal Penyesuaian Hibah lainnya atas Koreksi kurang atas hibah jasa TAYL yang dicatat sebagai beban akrual di LO – Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		4.154.976.699	(4.154.976.699)
6	Jurnal Penyesuaian Hibah lainnya atas Koreksi kurang atas hibah jasa TAYL yang dicatat sebagai beban akrual di LO – Satker Komisi Aparatur Sipil Negara		2.670.614.271	(2.670.614.271)
JUMLAH				(6.957.446.275)

Transaksi Antar Entitas
Rp253.863.295.454

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp253.863.295.454 dan Rp322.388.513.743. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar Bendahara Umum Negara (BUN), maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas (LPE) merupakan penjumlahan dari Realisasi Pendapatan yang berupa Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Realisasi Belanja yang berupa Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Transfer masuk, Transfer keluar, Pengesahan Hibah.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 139 Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Nilai
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	208.970.613.949
313121	Diterima dari Entitas Lain	(277.526.891)
313211	Transfer Keluar	(188.787.665)
313221	Transfer Masuk	36.743.387.000
291131	Pengesahan Hibah Langsung	8.615.809.001
Jumlah		253.863.295.454

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp208.970.613.949

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

DKEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp208.970.613.949 dan Rp313.618.680.764. DKEL merupakan transaksi antar entitas atas belanja Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kas Negara.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
Rp277.526.891

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp277.526.891 dan Rp1.202.847.300. DDEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kas Negara.

Transfer Keluar
Rp188.787.665

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp188.787.665 dan Rp0. Transfer Keluar merupakan

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian PANRB, antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan BA-BUN. Penyelesaian Langsung Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi berupa rumah dinas Menteri/Pejabat Kementerian PANRB yang tercatat sebagai Aset dari Sekretariat Negara, renovasi menggunakan anggaran Kementerian PANRB (BA.048, Satker 427950) akan tetapi karena aset melekat dan dimiliki oleh Sekretariat Negara (Kementerian Sekretariat Negara) maka nilai realisasi/perolehan ditransfer Keluar ke Kementerian Sekretariat Negara.

Rincian Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Transfer Keluar (Akun 313211)

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Entitas	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
136111	Penyelesaian Langsung Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Kementerian Sekretariat Negara	188.787.665	-	188.787.665
Jumlah			188.787.665	-	188.787.665

Transfer Masuk
Rp36.743.387.000

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.743.387.000 dan Rp0. Transfer Masuk merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian PANRB, antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan BA-BUN. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan, yang diterima dari KPK dengan BAST No. BA-01/BMN-KASN/11/2020, penyerahan ini dilakukan dalam rangka penetapan status penggunaan dari KPK RI kepada Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 229/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Luas Tanah 2.345 M² dan Luas Bangunan 1.040 M² yang beralamat di Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A RT 011/06, Kelurahan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dan dicatatkan pada tanggal 30 November 2020.

Rincian Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 141 Rincian Transfer Masuk (Akun 313221)

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Entitas	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
131111	Tanah	Komisariat Aparatur Sipil Negara	32.784.833.000	-	32.784.833.000
133111	Gedung dan Bangunan	Komisariat Aparatur Sipil Negara	3.958.554.000	-	3.958.554.000
Jumlah					36.743.387.000

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp8.615.609.061

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.615.609.061 dan Rp9.972.680.279. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian PANRB dalam bentuk Kas, Barang maupun Jasa sedangkan Pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 142 Rincian Pengesahan Hibah Langsung (Akun 391131)

(dalam Rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	234.050.000
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.303.677.484
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	331.899.300
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	340.923.630
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	29.589.241
427950	Ministeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.851.299.195

427950	Mendan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	12.799.614
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	2.711.320.545
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	381.259.325
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	418.793.725
JUMLAH		8.615.509.061

Rincian atas Hibah Langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Hibah Langsung

(dalam Rupiah)

No	Pemberi HIBAH	No. Dokumen/BAST	Tgl. Dokumen	Nilai Pengesahan
1	TASPEH	BAST No. BA-1/K/2020 No. 04/BN 00/2020	09-03-2020	234.050.000
2	DFAT	BAST No. 129/KS 01/2020	24-11-2020	2.303.677.484
3	GIZ	BAST No.002/TRANSFORMASI- BRIMKOK/BARANG/2020	23-12-2020	331.899.300
4	KOICA	BAST No. KOICA/2020/382	15-12-2020	340.923.630
5	GIZ	BAST No.002/TRANSFORMASI- BRIMKOK/BARANG/2020	23-12-2020	29.589.241
6	GIZ	BAST No.002/TRANSFORMASI- BR/YANLUKJASA-2020	23-12-2020	1.851.296.195
7	GIZ	BAST No.002/TRANSFORMASI- BRIMKOK/BARANG-2020	23-12-2020	12.799.614
8	USAID	140/USAID-INVA/BAST-Service/DRG	14-07-2020	2.711.320.545

9	USAID	241/USAID-INA/BAST-Service/DRG	25-11-2020	381.250.320
10	DPAT	07/Hibah DPAT/KASN/XII/2020	18-12-2020	418.793.725
Jumlah				8.615.609.061

Kenaikan Ekuitas
Rp40.249.084.379

E.5 Kenaikan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terjadi Kenaikan Ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp40.249.084.379 dan Rp30.894.007.648. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 144 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Surplus/Defisit-LO	(206.836.270.938)
2	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar (a+b+c+d+e+f)	(6.777.940.137)
a	Penyesuaian Nilai Aset	0
b	Koreksi Nilai Persediaan	0
c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0
d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	276.303.000
e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(96.796.626)
f	Koreksi Lain-lain	(6.957.446.275)
3	Transaksi Antar Entitas	233.863.295.454
4	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	40.249.084.379

Ekuitas Akhir

Rp143.711.174.107

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp143.711.174.107 dan Rp103.462.089.728. Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun berjalan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat Catatan Pendapatan Hibah kurang catat pada BAST No. 002/MKOK/TRANSFORMASI-BR/MKOK/BARANG/2020 yang diterima di Satuan Kerja Menteri Negara PANRB (427950), atas barang berupa *Notebook* Fujitsu Lifebook E756 yang salah catat sebesar 841 Euro (Berdasarkan Kurs Tengah 2017, 1 Euro = Rp16.760,96). Dengan demikian, Nilai Buku Laptop tersebut seharusnya Rp14.096.001.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Selama Periode Januari sampai dengan Desember 2020 telah dilakukan 6 (enam) kali Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Eksternal pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) dan 5 (lima) kali Revisi DIPA Internal (Kewenangan KPA). Sedangkan selama TA 2020 Satker Komisi Aparatur Sipil Negara (015416) telah melakukan 8 (delapan) Kali Revisi DIPA Eksternal dan 6 (enam) Kali Revisi DIPA Internal.
2. Terdapat Pembayaran dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara yang tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2020 dan baru terbayarkan pada TA 2021 dikarenakan permasalahan pada sistem perbankan dalam penyaluran CMS (*Cash Management System*).
3. Tanah yang di atasnya terdapat gedung Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan luas 9960 m², adalah Tanah Dan Bangunan milik Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian PANRB telah melakukan perjanjian penggunaan sementara dengan Kementerian Sekretariat Negara dengan perjanjian Nomor PERJ-11/Kementerian Sekretariat Negara/Ses/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Kementerian PANRB telah mengirimkan permohonan perpanjangan Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai Surat Nomor B/24/BN.01/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
4. Tanah yang di atasnya terdapat Gedung Komisi Aparatur Sipil Negara dengan luas 1024 m², adalah Tanah Dan Bangunan milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian PANRB u.p. Satker Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan perjanjian penggunaan sementara dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan perjanjian Nomor 31/PRJ/M.KUKM.1/IX/2015 dan Nomor 2971/PRJ/Kementerian PANRB/IX/2015 tanggal 9 September 2015 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 31/BAST/M.KUKM.1/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
5. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Desain Ruang Kerja 2020 di Kementerian PANRB berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 981/PPK-DMPTT/PANRB/07/2020 tanggal 26 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp74.916.600.

6. Terdapat Kewajiban Atas Gugatan Hukum sebesar Rp3.816.000 yang statusnya sudah final namun belum dianggarkan dan belum dibayarkan pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.: 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020 dengan amar yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya dan menghukum Termohon PK (dalam hal ini Kementerian PANRB) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali. Biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang wajib dibayarkan oleh Menteri PANRB sebesar Rp 2.816.000 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Sudah *inkracht*.
 - b. Putusan No.: 30P/HUM/2020, yang ditetapkan pada 04 Juni 2020, yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon LIE PUTRA SETIAWAN, S.H., M.H., dan menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dalam hal ini Kementerian PANRB

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

I. Lampiran A1

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2020		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2020	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133111	TANAH		0	0	1	36.743.387,000	0	3.958.554,000	1	32.784.833,000
2.01.01	TANAH PERSIL		0	0	1	36.743.387,000	0	3.958.554,000	1	32.784.833,000
133113	PERALATAN DAN MESIN		25,800	112.547,485,774	1,836	17.728.852,700	300	3.317.579,480	14,761	138,786,654,094
3.01.01	ALAT BESAR DARAT		1	297,481,800	0	0	0	0	1	297,481,800
3.01.03	ALAT BANTU		25	2,919,623,600	3	12,331,000	0	0	28	2,931,954,600
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		175	32,569,447,200	8	1,354,750,000	7	383,829,000	176	33,540,368,200
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK		0	0	5	7,835,000	0	0	5	7,835,000

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

	BERMOTOR									
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		5	12,141,346	0	0	0	0	5	12,141,346
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		14	30,678,800	6	11,000,000	0	0	20	41,678,800
3.03.03	ALAT UKUR		11	293,458,780	0	0	0	0	11	293,458,780
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		16	59,966,500	5	18,750,000	0	0	21	78,716,500
3.05.01	ALAT KANTOR		1,442	10,251,652,980	165	1,040,821,389	15	69,747,322	1,592	11,222,727,047
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		5,309	20,944,486,541	610	2,759,425,178	160	672,065,178	5,759	23,031,846,539
3.06.01	ALAT STUDIO		255	2,413,000,041	56	1,030,409,500	9	96,506,833	302	3,346,902,708
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		233	2,175,005,105	49	335,387,200	3	27,066,000	279	2,483,326,305
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		28	78,891,200	0	0	0	0	28	78,891,200
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		31	214,959,039	42	74,213,500	0	0	73	289,172,539
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		0	0	1	7,485,000	0	0	1	7,485,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		35	840,176,194	46	214,275,000	0	0	81	1,054,451,194
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		77	58,465,000	0	0	0	0	77	58,465,000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		1	38,500,000	3	3,735,000	0	0	4	42,235,000

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		1	9,350,000	0	0	0	0	1	9,350,000
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		50	77,164,400	89	476,068,500	0	0	139	553,250,900

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2020		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2020	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		1	95,204,000	1	8,569,000	0	0	2	103,773,000
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI		4	28,549,308	0	0	0	0	4	28,549,308
3.09.02	Persenjataan non senjata api		10	71,200,000	0	0	0	0	10	71,200,000
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		30	80,488,101	1	6,133,500	0	0	31	86,621,601
3.10.01	KOMPUTER UNIT		1,381	21,686,816,789	323	4,731,633,705	147	1,815,755,427	1,537	24,602,695,087
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		1,286	14,708,302,060	218	5,437,497,078	54	245,124,724	1,450	19,900,674,404
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		4	6,000,000	0	0	0	0	4	6,000,000
3.15.02	ALAT PELINDUNG		2	23,100,000	0	0	0	0	2	23,100,000
3.15.03	ALAT SAR		9	12,210,000	2	109,870,250	1	7,485,000	10	114,595,250
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		19	211,252,000	2	20,800,000	0	0	21	232,052,000

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		9	117,610,000	0	0	0	0	9	117,610,000
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		16	22,300,000	0	0	0	0	16	22,300,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		0	0	4	65,545,000	0	0	4	65,545,000
123111	GEDUNG DAN BANGUNAN		4	72,771,604,892	5	4,415,012,200	0	0	10	77,236,617,092
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		4	72,771,604,892	5	3,989,071,200	0	0	9	76,760,676,092
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		0	0	1	475,941,000	0	0	1	475,941,000
134112	JARINGAN		2	1,383,218,550	0	0	0	0	2	1,383,218,550
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		1	1,001,221,550	0	0	0	0	1	1,001,221,550
5.04.03	JARINGAN TELEPON		1	393,995,000	0	0	0	0	1	393,995,000
135111	ASET TETAP RENOVASI		0	0	10	375,358,902	4	225,198,215	4	780,160,587
6.07.03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		0	0	1	188,787,665	1	188,787,665	0	0
6.07.05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI		0	0	9	786,569,237	5	36,408,650	4	750,160,587

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2020		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2020	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13512	ASET TETAP LAINNYA		2,783	1,181,183,586	229	52,807,530	0	0	3,012	1,233,991,126
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		2,783	703,587,595	229	52,807,530	0	0	3,012	756,395,125
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		1	363,100,000	0	0	0	0	1	363,100,000
6.05.01	TANAMAN		1	114,500,000	0	0	0	0	1	114,500,000
180112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		9	2,972,008,800	520	2,968,390,880	294	2,418,142,217	35	3,120,855,071
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		5	2,197,500,000	7	383,829,000	0	0	12	2,581,329,000
3.05.01	ALAT KANTOR		0	0	15	69,747,322	15	69,747,322	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		0	0	88	368,957,038	84	338,315,538	4	30,641,500
3.08.01	ALAT STUDIO		0	0	9	96,506,833	9	96,506,833	0	0

LAMPIRAN A1
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

3.05.02	ALAT KOMUNIKASI		0	0	3	27,066,000	3	27,066,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		2	45,108,800	144	1,775,159,171	134	1,651,297,800	12	168,970,171
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		2	330,000,000	54	245,124,724	49	235,209,724	7	339,915,000
T O T A L			188,268,098,611		62,929,506,518		9,919,473,016		241,278,132,113	

II. Lampiran A2

Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No.Rek		Jumlah	Tunai/No.Rek	
1.	427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Nihil	-	-	Nihil	-	-
2.	015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	Nihil	-	-	Nihil	-	-
Jumlah			Nihil			Nihil		

Saldo Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No.Rek		Jumlah	Tunai/No.Rek	
1.	427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	5.837.398.036	Rekening BP	-	14.651.608	Tunai dan Rekening BP	-
2.	015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	13.839.322	Tunai	-	9.120.000	-	-
Jumlah			5.851.237.358	Rekening BP dan Tunai		23.771.608		

Saldo Kas Hibah Langsung

(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No.Rek		Jumlah	Tunai/No.Rek	
1.	427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Nihil	-	-	Nihil	-	-
2.	015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	Nihil	-	-	Nihil	-	-
Jumlah			Nihil			Nihil		

III. LAMPIRAN PENDUKUNG

1. Nota kesepakatan angka asersi final
2. Rincian laporan yang dihasilkan aplikasi, antara lain:
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
 - e. Neraca
 - f. Neraca Percobaan Akrua
 - g. Neraca Percobaan Kas
 - h. Laporan Operasional
 - i. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan pengguna barang
4. Daftar, dokumen, atau tabel yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal

1. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final



**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENPAN-RB (BA 048) TAHUN 2020
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)**

Nomor : NKF-048/42/PB.6/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 April 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara *Online* untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan KEMENPAN-RB (BA 048) Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas KEMENPAN-RB (BA 048) Tahun 2020 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2020 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka KEMENPAN-RB (BA 048) menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) paling lambat tanggal 5 Mei 2021.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (P. 048)



Sri Susanti

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febrian

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK

Novia Angraini

LAMPUAN NOTA KESERAKATAN

Nomor : NF-048K2PB.02021

Tanggal : 22 April 2021

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Region Anggaran

Urutan Region Anggaran

048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI Birokrasi

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+6	10 = 3+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	277.526.891	-	277.526.891	-	-	-	-	277.526.891	-	277.526.891
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari FDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PDBP Lainnya	277.526.891	-	277.526.891	-	-	-	-	277.526.891	-	277.526.891
426. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	277.526.891	-	277.526.891	-	-	-	-	277.526.891	-	277.526.891

B. BELANJA

JANG BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+7	11 = 4+9	12 = 10-11
51. Belanja Pegawai		80.012.025.731	12.309.587	75.900.436.004	-	-	-	-	80.012.025.731	12.309.587	75.900.436.004
52. Belanja Barang dan Jasa		111.687.799.276	762.041.690	110.925.757.586	-	-	-	-	111.687.799.276	762.041.690	110.925.757.586
53. Belanja Modal		18.045.219.000	-	18.045.219.000	-	-	-	-	18.045.219.000	-	18.045.219.000
54. Belanja Pembangunan Kewajiban Utang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Belanja Hibah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Belanja Belanja Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA		209.745.044.706	774.430.757	208.970.613.949	-	-	-	-	209.745.044.706	774.430.757	208.970.613.949

Jakarta, April 2021
Kementerian Dalam NegeriDi Saksi
MP 1962 1 01110 2

Dijeri Kepala Kantor



Badan Pemeriksa Keuangan,

Naris Anggani
NP 157911042006042001

Dijeri Perencanaan,



LAPOREAN PROFESSIONAL
WYATT PERDUE YLIG GEARAKHIA 31 DESEMBER 2020

HIL : JERNYENTERAN PERKAWA GEMARA APARAT LER NEGARA & REFORMAS PRORAS
BA : 043

[illegible]

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KIL : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI Birokrasi
 BA : 048

	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	82.121.212					82.121.212
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	92.017.000					92.017.000
Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(9.895.788)	0	0	0	0	(9.895.788)
SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0					0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0					0
Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0					0
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	332.894.385					332.894.385
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	111.308.438					111.308.438
Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	221.574.957	0	0	0	0	221.574.957
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	211.679.169	0	0	0	0	211.679.169
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	0					0
Beban Luar Biasa	0					0
SURPLUS(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0	0	0
SURPLUS(DEFISIT) LG	(214.210.197.499)	(140.769.755)	(7.522.695.316)	0	0	(208.836.278.938)

Jakarta,
 Komit

Sri Suci
 NIP 1971122011012001

Ditjen Kekayaan Negara

Bambang Istiyono
 NIP 19711008199000001

Badan Pemeriksa Keuangan,

Novia Anggarini
 NIP 197911042006042001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Subianto Singamita
 NIP 197112211989011001

BA-141

[illegible]

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : MKF-043/42/PB.2/2021
Tanggal : 22 April 2021

KIL : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
ASET LAINNYA						
Kendaraan Dengan Pihak Ketiga	-					-
Aset Tak Berwujud	3.020.903.570	400.600.900	-			4.251.103.570
Dana yg Dibekali Penggubatan	-					-
Dana Penjaminan	-					-
Dana Kasdan BLU	-					-
Aset Lain-lain	3.093.879.000	309.525.671	-			3.303.403.671
Akum. Penyusutan Kendaraan Dg Pihak Ketiga	-	-	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(2.911.329.000)	-	178.625.968			(3.090.954.968)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.985.324.320)	-	180.607.803			(3.075.932.123)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(176.918.750)					(176.918.750)
Jumlah Aset Lainnya	930.669.485	948.126.571	369.493.368	-	-	1.410.423.788
JUMLAH ASET	149.891.816.182	7.512.973.967	6.947.884.887	-	-	156.067.899.282
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	6.342.214.873	5.991.006.423	5.903.764.888			6.304.972.856
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-					-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-					-
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.400.772	0	38.261.587			41.732.359
Hutang Yang Belum Dibayarkan	-					-
Utang Muka dari NPPN	-	0	0			-
Pendapatan Ditunda Circula	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.345.705.445	5.991.006.423	5.942.026.475	-	-	6.348.725.175
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-					-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BLN	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN	6.345.705.445	5.991.006.423	5.942.026.475	-	-	6.348.725.175
EKUITAS	143.226.104.737	7.512.687.329	7.998.126.500			143.711.174.180
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	149.891.816.182	13.474.663.648	13.940.752.740			156.067.899.282

Jakarta, 22 April 2021
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Pemeriksa Keuangan,

Sri Susanto
NIP 198212232012001

Novia Anggarini
NIP 197911042006042001

Dijen Kekayaan Negara

Staf Perbandharaan,

Bendahara Umum
NIP 1971090919920001001

Denny Febrian Singawati
NIP 196102111980031001



LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : MEF-000/KZPB.02021
Tanggal : 22 April 2021

KJL : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED REVAL	ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT		
MODAL AWAL	103.402.000.720				103.402.000.720
SURPLUS/DEFISIT LD	(214.210.197.499)	140.701.755	7.577.695.316		(208.026.270.930)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
Penyesuaian Nilai Aset	-				-
Koreksi Nilai Persediaan	-				-
Selisih Revaluasi Aset	270.300.000	-	-	-	270.300.000
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(12.734.027)	547.297.900	403.234.605		(10.790.862)
Koreksi Aset Revaluasi	-				-
Koreksi Lain-lain	(131.855.300)	8.625.500.070	-	-	(10.957.446.270)
JUMLAH KOREKSI KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	131.713.600	7.372.900.470	403.234.605	-	(6.777.900.120)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	253.050.400.040	-	12.700.014	-	253.063.295.454
Ditagikan ke Entitas Lain	200.070.010.040	-	-	-	200.070.010.040
Diterima dari Entitas Lain	(277.520.001)	-	-	-	(277.520.001)
Transfer Keluar	(100.207.000)	-	-	-	(100.207.000)
Transfer Masuk	30.743.307.000	-	-	-	30.743.307.000
Penghasilan Hibah Langsung	8.602.012.447	-	12.700.014	-	8.615.000.001
Penghasilan Hibah Langsung TAYL	-				-
Penghasilan Pengembalian Hibah Langsung	-				-
Seranan Surplus BLU	-				-
Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	-				-
Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	-				-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	30.704.015.000	7.513.657.225	7.000.726.005	-	40.240.004.370
MODAL AKHIR	143.226.104.737	7.513.657.225	7.000.726.005	-	143.711.174.107

Jakarta, April 2021
Kementerian LKPP

Sh Susanti
NIP 198211222017000001

Ditjen Kekayaan Negara.

Bambang Sulistyono
NIP 19710809199000001

Badan Pemeriksa Keuangan,

Novia Anggarini
NIP 197911042000042001

Ditjen Perbendaharaan

Demay Shalewa Sinaga
NIP 197102111975000001

2. Rincian Laporan Keuangan dari e-Rekon & LK





BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-161145/WPB.11/KP.133/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (427950) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	184,752,191,000	184,752,191,000	0
2	Belanja	173,451,620,785	173,451,620,785	0
3	Pengembalian Belanja	-539,418,807	-539,418,807	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	268,406,891	268,406,891	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	5,104,235,464	5,104,235,464	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ahmad Yusuf
NIP.197102101992011001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.
NIP.196111021988111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah didorikasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (427050)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SIAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SIAP : 184,752,191,000
SAI/SA-BUN : 184,752,191,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SIAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SIAP : 173,461,820,785
SAI/SA-BUN : 173,461,820,785

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SIAP : -539,418,807
SAI/SA-BUN : -539,418,807

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SIAP : 268,406,891
SAI/SA-BUN : 268,406,891

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SIAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SIAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengejaran

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Buffer Layanan Umum

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SIAP : 5,104,235,464

SAI/SA-BUN : 5,104,235,464

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ahmad Yusuf
NIP.197102101982011001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dra. Dwi Wahyu Aimaji, M.P.A.
NIP.196111021988111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah didokumentasikan secara elektronik, tidak dibubuhkan tanda tangan basah.



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-160106/WPB.11/KP.133/2020

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) (015416) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA IV , yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	39,614,155,000	39,614,155,000	0
2	Belanja	36,324,967,275	36,324,967,275	0
3	Pengembalian Belanja	-266,555,304	-266,555,304	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,120,000	9,120,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	3,511,373,597	3,511,373,597	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ahmad Yusuf
NIP.197102101992011001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

Abdul Hakim
NIP.197305052005011012

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) (015416)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 39,614,155,000

SAI/SA-BUN : 39,614,155,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Eliminasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 36,324,987,275

SAI/SA-BUN : 36,324,987,275

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -266,556,304

SAI/SA-BUN : -266,556,304

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 9,120,000

SAI/SA-BUN : 9,120,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SIAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Penghasilan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SIAP : 3,511,373,597

SAI/SA-BUN : 3,511,373,597

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan Kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

Ahmad Yusuf
NIP.197102101992011001



Abdul Hakim
NIP.197305052005011012

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah direvisi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 03/05/21 11:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	277,526,891	(277,526,891)	0	0	1,202,847,300	(1,202,847,300)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	277,526,891	(277,526,891)	0	0	1,202,847,300	(1,202,847,300)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	90,726,869,000	79,999,636,664	10,729,232,336	88	84,504,045,000	83,374,031,254	1,130,013,746	99
	BELANJA BARANG	115,370,831,000	110,925,757,586	4,445,073,414	96	226,323,012,000	216,017,293,001	10,305,728,999	95
	BELANJA MODAL	18,266,646,000	18,045,219,699	221,426,301	99	14,706,802,000	14,227,366,509	479,435,491	97
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	224,366,346,000	208,970,613,949	15,395,732,051	93	325,533,859,000	313,618,680,764	11,915,178,236	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA BKL.1
Tanggal : 03/05/21 11:28
Halaman : 1
Fig ID : lap_jra_bel_jalan_11 -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN INFORMASI BIROKRASI

KODE	JURUAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMDAILAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3/4	9=4-7
51	BELANJA NEGARA							
5111	Belanja Perjalanan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Perjalanan Tunjangan PNS	24,708,577,000	24,410,950,000	22,157,334,847	6,172,036	26,150,705,149	84.84	1,985,808,441
511115	Belanja Perjalanan Tunjangan PNS	408,000	488,000	356,520	5,440	364,389	78.98	121,911
511121	Belanja Tunj. Susut Masa PNS	3,244,031,000	1,013,841,000	1,293,712,884	404,400	1,263,842,064	62	750,558,046
511122	Belanja Tunj. Anjak PNS	520,758,000	536,001,000	312,476,264	40,806	313,351,275	60.17	211,486,725
511123	Belanja Tunj. Anjak PNS	8,527,540,000	7,887,640,000	3,114,305,003	2,836,000	3,112,541,003	36.59	4,715,098,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	304,104,000	304,704,000	345,306,000	1,390,000	344,336,000	87.8	200,875,000
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	175,548,000	175,748,000	136,380,836	0	150,380,836	68.34	20,411,164
511128	Belanja Tunj. Baku PNS	1,009,108,000	1,009,108,000	942,111,780	268,080	942,822,100	93.36	67,073,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,083,440,000	5,495,822,000	4,045,806,000	21,8200	4,046,067,700	75.67	1,449,054,300
511131	Belanja Tunjangan Umum PNS	700,112,000	844,930,000	772,800,000	0	772,800,000	97.47	72,660,000
	JUMLAH SUB KLOMPOK BELANJA 5111	39,009,351,000	29,778,804,000	31,270,706,846	11,610,406	31,864,705,518	80.39	4,514,127,484
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honorarium	7,408,892,000	7,400,362,000	8,081,740,448	0	8,081,740,448	82.11	1,326,101,051
	JUMLAH SUB KLOMPOK BELANJA 5121	7,408,892,000	7,400,362,000	8,081,740,448	0	8,081,740,448	62.71	1,326,101,051
5122	Belanja Lain-lain							
512211	Belanja Uang Lain-lain	788,886,000	484,718,000	229,758,000	320,000	589,400,000	52.77	1,05,904,000
	JUMLAH SUB KLOMPOK BELANJA 5122	788,886,000	484,718,000	229,758,000	320,000	589,400,000	52.77	1,05,904,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Perjalanan Transita							
512411	Belanja Perjalanan (Tunjangan Khusus & Perjalanan)	48,252,745,000	44,082,306,000	30,384,749,328	1,018,631	30,383,730,704	62.85	4,894,834,268
	JUMLAH SUB KLOMPOK BELANJA 5124	48,252,745,000	44,082,306,000	30,384,749,328	1,018,631	30,383,730,704	62.85	4,894,834,268
	JUMLAH KLOMPOK BELANJA 51	93,129,140,000	80,728,568,000	50,012,026,171	12,889,067	50,009,137,104	53.69	10,723,832,888
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Kebutuhan Perawatan	7,381,828,000	7,475,813,000	7,872,752,889	1,600,000	7,872,152,889	86.35	104,000,111
521113	Belanja Pemeliharaan Daya Tahan Tubuh	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Paket Dinas Pos Rural	481,885,000	473,881,000	477,406,000	0	477,406,000	99.17	6,014,812
521116	Belanja Bahan Operasional Saluran Kerja	856,783,000	785,080,000	769,880,000	0	769,880,000	89.76	3,240,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,036,310,000	2,511,146,000	2,523,828,348	0	2,523,828,348	97.88	54,521,651
521121	Belanja Barang Operasional - Peralengkapan Peralatan Komunikasi	0	756,158,000	640,300,000	0	640,300,000	84.65	113,818,000
	JUMLAH SUB KLOMPOK BELANJA 5211	11,328,036,000	13,061,007,000	11,776,368,844	1,600,000	11,724,768,844	87.22	309,716,356
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,500,636,000	8,255,924,000	6,410,936,890	0	6,410,936,890	51.28	400,037,110

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL1
Tanggal : 03/05/21 11:28
Halaman : 2
Pg ID : lap_lra_bel_shm_kj -

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMDIALIAN BELANJA	BELANJA NETO		
1	2	3	4	5	6	7-8-9	8-9/4	9-4-7
521218	Belanja Honor Outset Kegiatan	1.441.890,000	620.120,000	806,040,000	0	636,540,000	98,97	29.350,000
521219	Belanja Honor Non Operasional Lainnya	5.426.832,000	1.702.818,000	1.664.514,000	0	1.664.514,000	38,82	10.436,500
521241	Uskara Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	238,093,000	162.801,000	0	162.801,000	7,31	65.292,000
	JUMLAH SUB KEMUKOK BELANJA 5212	14.774,047,000	8,416,956,000	11,401,721,000	0	11,401,721,000	94,54	514,326,150
52110	Belanja Barang Persediaan							
52111	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.438.168,000	4.219,181,000	4.123,036,478	0	4.123,036,478	97,97	36,041,522
52112	Belanja Barang Persediaan Lainnya	45,112,000	0	0	0	0	0	0
521141	Barang Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.130,908,000	1.100,211,000	0	1.100,211,000	99,77	2.654,978
	JUMLAH SUB KEMUKOK BELANJA 5211	4,483,280,000	5,350,089,000	5,223,247,478	0	5,223,247,478	98,17	25,732,522
5221	Belanja Jasa							
52211	Belanja Langganan Udara	8.600,000,000	7.950,616,000	7,979,088,046	0	7,979,088,046	97,19	41,556,954
522112	Belanja Langganan Telekom	223,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	75,48	20,420,000
522113	Belanja Langganan Air	7.377,000	7.770,000	7,770,000	0	7,770,000	99,49	5,530,000
522118	Belanja Langganan Biaya dan Jasa Lainnya	1.673,007,000	1.779,616,000	1,809,774,554	0	1,809,774,554	94,59	93,890,446
522181	Belanja Jasa Konsultan	7.521,140,000	2.012,892,000	2,294,089,000	0	2,294,089,000	30,48	14,388,000
522111	Belanja Biaya	11.900,000,000	3,640,735,000	3,640,735,000	0	3,640,735,000	30,42	258,570,775
522181	Belanja Jasa Hotel	10.000,000,000	5,994,589,000	6,281,145,000	0	6,281,145,000	94,21	828,458,000
522182	Belanja Jasa Lainnya	14,311,425,000	10,000,000,000	10,702,770,145	0	10,702,770,145	93,64	100,682,855
522192	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,360,705,000	5,204,624,000	0	5,204,624,000	86,25	704,840,151
	JUMLAH SUB KEMUKOK BELANJA 5221	60,049,495,000	33,848,873,000	32,154,384,000	0	32,154,384,000	55	1.895,111,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.531,888,000	4.584,925,000	4,635,875,718	0	4,635,875,718	99,36	24,442,282
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,032,672,000	3,079,808,000	5,003,898,185	23,800,000	4,980,098,185	93,53	85,051,815
523124	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600,000,000	542,865,000	610,167,820	0	610,167,820	95,12	26,467,820
	JUMLAH SUB KEMUKOK BELANJA 5231	6,164,560,000	10,202,088,000	10,249,941,723	23,800,000	10,249,941,723	98,97	152,088,277
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas	41.605,047,000	40,411,677,000	40,382,381,208	104,360,000	40,318,044,808	99,26	1.002,002,192
524112	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.940,450,000	680,800,000	431,040,000	0	431,040,000	61,92	66,100,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000,000,000	17,500,000,000	17,467,051,000	21,75,000	17,465,876,500	97,53	444,251,500
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,440,000,000	254,720,000	0	254,720,000	8	25,180,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,068,089,000	5,070,964,000	5,215,940,640	0	5,215,940,640	63,02	50,023,360
	JUMLAH SUB KEMUKOK BELANJA 5241	90,607,304,000	64,670,378,000	63,522,118,448	707,141,000	62,784,211,748	87,80	1,895,107,252
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas - Luar Negeri	5,770,916,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 03/03/2024 11:26
Halaman : 3
Pg ID : lap 1a bel akun_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI Birokrasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGLASARAN	SIGA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=7/4	9=4-7
	JUMLAH SUBKOMPONEN BELANJA 5202	5,776,446,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KOMPONEN BELANJA 52	202.219,038,000	115.570,831,000	111.857,792,211	762,041,360	10,025,754,599	86,81	1.143.073,444
52	BELANJA MODAL							
5201	Belanja Modal Pemeliharaan Bangun							
520111	Belanja Modal Pemeliharaan Bangun	3,706,254,000	15,757,258,000	10,503,555,367	0	10,009,056,367	90,34	104,871,633
520119	Belanja Modal Pemeliharaan dan Masin - Pemeliharaan (Perangin)	0	100,071,000	602,410,250	0	602,410,250	60,17	10,890,750
	JUMLAH BELANJA KOMPONEN BELANJA 5201	3,706,254,000	15,857,329,000	10,503,998,517	0	10,009,056,617	86,5	115,762,383
5201	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
520111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,444,000,000	275,000,000	274,711,800	0	274,711,800	50,9	258,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5201	4,444,000,000	275,000,000	274,711,800	0	274,711,800	50,9	258,200
5201	Belanja Modal Lainnya							
520111	Belanja Modal Lainnya	1,121,000,000	1,425,472,000	1,250,565,762	0	1,250,565,762	62,6	1.01,876,212
52012	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	93,875,000	90,576,800	0	90,576,800	63,8	120,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5201	1,121,000,000	1,519,347,000	1,341,142,562	0	1,341,142,562	63,69	106,805,712
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9.271,930,000	13.286,668,000	12,345,219,069	0	10,345,218,056	58,70	221,439,931
	JUMLAH BELANJA	304.620,938,000	224,295,348,000	239,746,044,700	774,430,757	200,970,615,340	56,43	10,855,732,351

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

Kode Lrp : EPA.P.KL1

Tanggal : 02/05/21 10:39

Halaman : 1

Page ID : lrp_hlp_pendapatan_kl--

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=3/6
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan dari Perjudian, Penghasilan BMN, Iuran Badan Usaha					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	62.121,212	0	62.121,212	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	62.121,212	0	62.121,212	0
4257	Pendapatan Bunga, Penghasilan Pokering Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	13.798,000	0	13.798,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	272.727	0	272.727	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	13.070,727	0	13.070,727	0
4259	Pendapatan Lain-lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40.485,952	0	40.485,952	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	141.851,092	0	141.851,092	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	182.334,952	0	182.334,952	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	277.526,891	0	277.526,891	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	277.526,891	0	277.526,891	

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 049

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Tgl. Cetak 03/05/2021 11:26 PM
 kpl_neraca_kl_komparatif-rekan17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Saluran Kas	4,081,207,350	23,771,008	3,747,436,750	21,214,80
Piutang Bukan Pajak	158,580,961	150,581,853	8,000,108	5,33
Pembiayaan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Diklat P55%	(804,500)	(802,870)	(1,630)	0,25
PIU (ANG BUKAN PAJAK (NETTO))	123,885,811	118,980,038	4,905,773	5,85
Persediaan	1,415,814,857	1,301,041,177	114,773,730	10,0
JUMLAH ASET LANCAR	7,899,587,619	1,204,803,768	6,694,783,151	281,32
ASET TETAP				
Tanah	32,734,323,000	0	32,734,323,000	0,00
Perakitan dan Mesin	24,345,357,892	108,682,852,243	(14,340,025,414)	19,04
Gedung dan Bangunan	77,217,303,032	67,771,004,892	9,446,298,200	11,11
Jalan, Jembatan dan Lintasan	1,065,210,520	1,348,216,500	(283,005,980)	0,30
Aset Takberwujud Lainnya	1,408,650,772	1,358,207,680	50,443,092	3,73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	74,318,600	0	74,318,600	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(93,434,471,004)	(84,083,926,601)	(9,350,544,151)	11,07
JUMLAH ASET TETAP	141,284,127,815	101,188,009,423	40,096,118,100	39,07
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Pemerintah Pusat dan Daerah	752,120,873	703,416,500	48,704,373	6,93
Pembiayaan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Turunan Perbendaharaan/Umum dan Rasi	(703,122,873)	(703,416,500)	293,627	(0,05)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,281,128,570	4,274,073,032	(2,992,944,462)	0,50
Aset Lainnya	3208,406,871	2,572,625,800	635,781,071	28,41
AKUMULASI PENYUSUTAN KURSI GIGI ASET LAINNYA	(5,144,075,183)	(5,430,167,354)	286,092,171	18,15
JUMLAH ASET LAINNYA	1,410,400,158	1,395,690,478	14,709,679	0,97
JUMLAH ASET	190,057,209,289	102,998,324,619	87,058,884,669	44,25
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,204,672,805	538,793,822	7,665,878,983	1,051,17
Utang jangka Pendek Lainnya	11,735,369	2,514,534	9,220,835	1,000,42
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8,216,408,175	541,308,356	7,674,099,819	1,053,12
JUMLAH KEWAJIBAN	8,216,408,175	541,308,356	7,674,099,819	1,053,12
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	143,711,179,107	102,462,009,728	41,249,169,379	39,90
JUMLAH EKUITAS	143,711,179,107	102,462,009,728	41,249,169,379	39,90
JUMLAH EKUITAS	143,711,179,107	102,462,009,728	41,249,169,379	39,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	152,027,288,202	103,989,324,619	48,038,004,669	44,25

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akruaf_kf--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5,851,237,358	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	126,920,264	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	634,600
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,129,474,018	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117114	Suku Cadang	14,945,000	0
0.0	117121	Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0
0.0	117126	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	271,395,879	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	32,784,833,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	124,345,957,662	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	77,217,969,092	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	0	0
0.0	134113	Jaringan	1,395,216,550	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	750,160,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,119,495,125	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	74,916,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	88,708,701,869
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,032,399,702
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	693,319,470
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	783,139,873	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	783,139,873
0.0	162151	Software	3,907,743,570	0
0.0	162161	Lisensi	343,360,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166111	Aset Lain-lain	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,120,855,671	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	182,550,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	3,090,954,868
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,841,807,835
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	34,394,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	176,918,750
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	120,146,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	261,062,250
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	5,903,764,556
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	41,752,369
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	208,970,613,949
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	277,526,891	0
0.0	313211	Transfer Keluar	188,787,665	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	36,743,387,000
0.0	391111	Ekuitas	0	103,462,089,728
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	276,303,000
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39,359,362	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	57,437,500	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	8,957,446,275	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	8,615,609,061
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	82,121,212
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	12,798,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	40,483,950
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	132,731,002
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	146,871,443
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	23,157,184,647	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	6,478,068
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	359,538	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	5,449
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,223,712,884	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	469,930
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	318,475,264	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	93,989
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,114,805,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	2,235,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	545,585,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,260,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	155,336,836	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	942,111,780	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,946,915,450	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	218,300
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	772,900,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_aktual_kl-rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	6,081,790,449	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	288,729,000	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	320,000
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	39,364,749,333	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,018,631
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,375,038,247	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	1,600,000
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	300,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	442,849,688	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	758,820,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,526,623,346	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	644,792,048	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,450,790,670	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	605,640,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,684,514,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	162,631,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,511,391,171	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	88,512,935	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,619,095	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,685,774,554	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	2,834,698,980	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,630,817,725	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,072,480,833	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	11,151,029,491	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,483,478,976	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,472,980,718	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,997,006,165	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	23,300,000
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321,157,320	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	20,053,154,149	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	734,966,690
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	431,040,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,456,495,500	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	2,175,000
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	254,720,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,315,940,640	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,227,470,001	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,962,566,230	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	44,730,288	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	853,701,391	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	25,781,000	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_aktual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	5,631,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	18,915,544	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,031,037,285	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	237,885,100	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,517,656	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	341,000	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,020,508,346	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	111,309,438	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	907,327	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	272,727
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	62,898,741	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	92,017,000	0
JUMLAH			468,966,707,971	468,966,707,971

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Tgl. Cetak 03/05/2021 11:27 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	15,395,732,051	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	277,526,891	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	24,416,916,000
2.0	511118	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	486,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,973,841,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	529,881,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,527,540,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	804,704,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	175,748,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,009,196,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	5,495,622,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	844,980,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	7,406,892,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	484,718,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	44,058,365,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	7,476,213,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	300,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	473,661,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	765,060,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	2,581,145,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	765,123,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	6,855,924,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	629,120,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,702,949,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	228,059,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	4,219,181,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	1,190,906,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,653,645,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	120,000,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	7,200,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,776,625,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	2,848,992,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	3,940,735,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	5,584,553,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	10,918,358,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,999,765,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	4,569,825,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	11,850,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	5,078,608,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	542,855,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	20,341,077,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Tgl. Cetak 03/05/2021 11:27 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kf--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524113	Alotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	526,200,000
2.0	524114	Alotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	17,909,238,000
2.0	524115	Alotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	279,900,000
2.0	524119	Alotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	5,373,964,000
2.0	524211	Alotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0
2.0	532111	Alotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15,763,228,000
2.0	532119	Alotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	703,071,000
2.0	533111	Alotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	275,000,000
2.0	536111	Alotment Belanja Modal Lainnya	0	1,426,472,000
2.0	536121	Alotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	98,875,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	82,121,212
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	12,798,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	272,727
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	40,483,950
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	141,851,002
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	23,157,184,647	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,478,088
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	359,538	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	5,449
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,223,712,884	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	469,930
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	318,475,264	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	93,989
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,114,805,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,235,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	545,585,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,260,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	155,336,836	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	942,111,780	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,045,266,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	218,300
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	772,900,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	6,081,790,449	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	289,729,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	320,000
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	39,364,749,333	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	1,018,631
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,373,792,823	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,600,000
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	300,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	417,646,688	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Tgl. Cetak 03/05/2021 11:27 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	758,820,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,526,623,346	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	649,203,792	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,448,936,850	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	605,640,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,684,514,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	162,631,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,123,089,478	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	1,188,211,624	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,579,068,046	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	90,579,142	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,619,095	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,685,774,554	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,834,069,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,642,164,225	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,261,145,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,769,770,165	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,294,824,809	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,535,378,718	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	11,850,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,003,856,165	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	23,300,000
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	516,157,320	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	20,053,361,296	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	734,966,690
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	431,040,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,467,051,500	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,175,000
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	254,720,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,315,940,640	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,658,556,367	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	892,410,250	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274,711,800	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,320,865,782	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	98,675,500	0
Jumlah			225,418,303,648	225,418,303,648

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

: 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 03/05/21 11:26
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,391,213	(2,391,213)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	2,391,213	(2,391,213)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	2,391,213	(2,391,213)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	79,901,266,114	83,570,982,254	(3,669,716,140)	(4.391)
Beban Persediaan	5,051,886,631	4,742,766,436	309,120,195	6.518
Beban Barang dan Jasa	53,173,111,500	98,265,690,901	(45,092,579,401)	(45.888)
Beban Pemeliharaan	10,006,046,959	9,568,926,535	438,120,424	4.589
Beban Perjalanan Dinas	42,774,208,599	112,782,810,006	(70,008,601,409)	(62.074)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

: 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 03/05/21 11:26
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl -
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16,138,795,704	16,089,986,190	48,809,514	0.303
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	634,800	0	634,800	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	207,047,950,107	325,021,162,324	(117,973,212,217)	(36.297)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(207,047,950,107)	(325,018,771,111)	117,970,821,004	(36.297)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(9,895,786)	31,306,256	(41,202,044)	(131.61)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	82,121,212	36,123,456	45,997,756	127.335
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	92,017,000	4,817,200	87,199,800	1,810.176
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	221,574,957	376,530,469	(154,955,512)	(41.154)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	332,884,395	508,606,554	(175,722,159)	(34.55)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	111,309,436	132,076,085	(20,766,647)	(15.723)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	211,679,169	407,836,725	(196,157,556)	(46.097)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(206,836,270,938)	(324,610,934,386)	117,774,663,448	(36.282)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(206,836,270,938)	(324,610,934,386)	117,774,663,448	(36.282)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 03/05/21 11:26

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl--

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	103,462,089,728	72,568,082,080	30,894,007,648	42.572
SURPLUS/DEFISIT-LO	(206,836,270,936)	(324,610,934,386)	117,774,663,448	(36.282)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(6,777,940,137)	33,116,428,291	(39,894,368,428)	(120.467)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	276,303,000	34,454,731,394	(34,178,428,394)	(99.198)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(96,796,862)	(1,342,690,177)	1,245,893,315	(92.791)
LAIN-LAIN	(6,957,446,275)	4,387,074	(6,961,833,349)	(156.689.672)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	253,863,295,454	322,388,513,743	(68,525,218,289)	(21.255)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40,249,084,379	30,894,007,648	9,355,076,731	30.281
EKUITAS AKHIR	143,711,174,107	103,462,089,728	40,249,084,379	38.902

3. Rincian Laporan BMN dari e-Rekon & LK





CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK/05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud.

B. ENTITAS PELAPORAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

C. PERIODE PELAPORAN

Periode Pelaporan Barang Milik Negara Kementerian PANRB per 31 Desember 2020.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Penggolongan dan kodifikasi BMN telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
2. Kapitalisasi BMN telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa nilai minimum satuan kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 untuk :
 - 1) Peralatan dan Mesin; atau
 - 2) Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan
 - b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 untuk :
 - 1) Gedung dan Bangunan; atau
 - 2) Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan;



Serta dengan memperhatikan lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan “pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang **memperpanjang masa manfaat** atau yang kemungkinan besar memberi **manfaat ekonomis di masa yang akan datang** dalam bentuk **kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja**, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”.

3. Rekonsiliasi BMN dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat Aset Tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
5. Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATR) telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi ATB dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;



III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian PANRB.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp241.278.132.113,00 (dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp188.268.098.611,00 (seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp53.010.033.502,00 (lima puluh tiga milyar sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) yang merupakan nilai perolehan dari mutasi tambah sebesar Rp62.929.506.518,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp9.919.473.016,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2020 merupakan himpunan dari LBP pada 2 (*Dua*) Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 2 (*Dua*) Satuan Kerja Instansi Pusat.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);



5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Laporan Kondisi Barang;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal UAPA dan UAPB pada Kementerian PANRB;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2020

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020

Nilai BMN per 1 Januari 2020 menurut Kementerian PANRB adalah sebesar Rp188.268.098.611,00 (seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (Nilai BMN Yang Disajikan Dalam Neraca) Sebesar 187.806.000.085,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta delapan puluh lima rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp462.098.526,00 (empat ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

Mutasi BMN per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.415.814.897,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.361.041.077,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp54.773.720,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 - Barang Konsumsi	1.226.145.063	- 96.671.045	1.129.474.018
117113 - Bahan untuk Pemeliharaan	8.083.000	- 8.083.000	-
117114 - Suku Cadang	14.276.856	668.144	14.945.000
117121 - Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117122 - Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117128 - Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
117131 - Bahan Baku	341.000	- 341.000	-
117199 - Persediaan Lainnya	112.195.258	159.200.621	271.395.879
Jumlah	1.361.041.177	54.773.720	1.415.814.897

Semua barang persediaan pada Kementerian PANRB dalam kondisi baik, dan tidak ada yang dalam kondisi rusak ataupun usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.784.833.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah seluas 2.345 m² dengan nilai sebesar Rp32.784.833.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Transfer Masuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Putusan Mahkamah Agung jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	32.784.833.000

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	0,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Rp0,00 (nol rupiah) bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	2.345 m ²	Rp32.784.833.000,00
Rusak Ringan	0 m ²	Rp0,00
Rusak Berat	0 m ²	Rp0,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m²

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh, yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	0 m ²	Rp0,00
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	0 m ²	Rp0,00
Dikuasai pihak lain	0 m ²	Rp0,00



c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.756.454.088,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp110.347.480.774,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), mutasi tambah sebesar Rp17.726.552.798,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), mutasi kurang sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo akhir pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar Rp124.756.454.088,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 10.460 Kuantitas dengan Rp110.347.480.774,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), mutasi tambah jumlah barang 1.639 buah dengan nilai sebesar Rp17.726.552.798,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 396 buah dengan nilai sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Mutasi Tambah pada Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah	Rp36.743.387.000,00	Rp0,00
Peralatan dan Mesin	Rp17.663.654.057,00	Rp62.898.741,00
Gedung dan Bangunan	Rp4.446.364.200,00	Rp18.648.000,00
Jaringan	Rp0,00	Rp0,00
Aset Tetap Renovasi	Rp975.356.902,00	Rp0,00
Aset Tetap Lainnya	Rp52.807.530,00	Rp0,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp2.966.390.088,00	Rp0,00

Mutasi Kurang pada Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah	Rp3.958.554.000,00	Rp0,00
Peralatan dan Mesin	Rp3.317.578.643,00	Rp841,00
Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00
Jaringan	Rp0,00	Rp0,00
Aset Tetap Renovasi	Rp225.196.315,00	Rp0,00
Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp2.418.143.217,00	Rp0,00

Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.726.552.798,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut meliputi:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBN Tahun 2020 sebesar Rp16.132.594.867,00 dengan rincian sebagai berikut:



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.01.03 - Alat Bantu	12.331.000	-
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	1.120.700.000	-
3.02.02 - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.945.000	1.890.000
3.03.02 - Alat Bengkel Tak Bermesin	11.000.000	-
3.04.01 - Alat Pengolahan	18.750.000	-
3.05.01 - Alat Kantor	916.467.139	2.277.000
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	2.345.249.836	-
3.06.01 - Alat Studio	1.004.902.500	820.000
3.06.02 - Alat Komunikasi	325.143.200	-
3.07.01 - Alat Kedokteran	45.895.000	25.672.500
3.08.01 - Unit Alat Laboratorium	212.725.000	-
3.08.03 - Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.735.000	-
3.08.06 - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	476.086.500	-
3.08.07 - Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.569.000	-
3.09.04 - Alat Khusus Kepolisian	6.133.500	-
3.10.01 - Komputer Unit	4.117.566.064	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	5.271.871.378	2.650.000
3.15.03 - Alat Sar	109.870.250	-
3.15.04 - Alat Kerja Penerbangan	20.800.000	-
3.19.01 - Peralatan Olah Raga	65.545.000	-
Jumlah	16.099.285.367	33.309.500

2. Hibah Masuk (Transaksi 103) sebesar Rp949.258.785,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hibah berupa satu unit mobil *ambulance* yang diterima oleh Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai Rp234.050.000,00 dari PT. TASPEN (Persero) sesuai Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspem (Persero) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor JAN-132/DIR/2020 Nomor 03/S.BN.00/2020 tanggal Sembilan Maret Dua Ribu Dua Puluh. Adapun spesifikasi satu unit mobil *ambulance* adalah sebagai berikut :



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

- a. Merk/Type : Suzuki/APV GL ARENA MTEURO 4 NIK 2019 TYPE STANDAR
- b. No. Rangka : 402328
- c. No. Mesin : 434593
- d. Tahun Pembuatan : 2019
- e. Silinder : 1500 cc
- f. Kelengkapan : 1 (satu) set
1. lampu *Rotary Light Bar Oval* LTF 2000, BDR-06;
 2. *sirene Multi* Suara Lengkap dengan *Mic*;
 3. tempat duduk perawat dilengkapi dengan *box* peralatan;
 4. landasan tandu dilengkapi dengan tempat *Scoop Stretcher*;
 5. tabung pemadam kebakaran kapasitas 1 kg;
 6. lampu sorot belakang model *spot Light*;
 7. modifikasi lantai dari *polywood* dilapis dengan *vinil*;
 8. logo dan tulisan standard dari bahan *sticker* 3M;
 9. kaca film 60% - 80%;
 10. gantungan *infuse* model geser terbuat dari bahan *stainless steel*;
 11. bumper belakang mobil dilapis plat *stainless steel*;
 12. kotak P3K;
 13. *oxygen therapy set*, GBG - 08;
 - a. 1 (satu) buah tabung oksigen 1m3;
 - b. 1 (satu) buah *regulator* standard;
 - c. 1 (satu) set *Flowmeter* dan *Humidifier*;
 - d. 1 (satu) buah *Nasal Cannula*;
 - e. 1 (satu) buah Masker Oksigen;
 - f. *ambulance stretcher roll-in coat model*, GBG, 03, Konstruksi rangka *aluminium alloy* dan *stainless steel* lengkap dengan *mattress* dan *strap*;

- b) Hibah berupa dua belas unit *Notebook* yang diterima oleh Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai Rp340.923.630,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dari KOICA (Korea International Cooperation Agency) sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Barang Nomor: KOICA/2020/382 antara KOICA dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

NO	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH Barang	HARGA BARANG	
					USD	IDR
1.	Notebook	Samsung (Type NT340XAA-K14G) @USD767.24	14 inch HD 35,6cm	30	23,017.20	340,923,631.07
TOTAL					23,017.20	340,923,631.07

- c) Hibah berbagai macam jenis Peralatan dan Mesin yang diterima oleh Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

Rp387.082.610,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit)

3. Reklasifikasi masuk (Transaksi 107) senilai Rp374.800.591,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.05.01 - Alat Kantor	36.408.650	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	300.462.140	-
3.07.01 - Alat Kedokteran	2.646.000	-
3.07.02 - Alat Kedokteransehatan Umum	7.485.000	-
3.10.01 - Komputer Unit	27.798.801	-
Jumlah	374.800.591	-

4. Pengembangan aset langsung (Transaksi 202) senilai Rp155.107.100,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	9.348.000	-
3.10.01 - Komputer Unit	70.179.100	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	75.580.000	-
Jumlah	155.107.100	-

5. Perolehan lainnya (Transaksi 112) senilai Rp101.994.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.05.01 - Alat Kantor	29.988.000	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	48.106.000	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	23.900.000	-
Jumlah	101.994.000	-



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut meliputi :

1. Penghentian Dari Penggunaan (Transaksi 401) sebesar Rp2.966.390.088,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rp383.829.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13/BN.04/2020 tanggal 12 Maret 2020.

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	383.829.000	-
Jumlah	383.829.000	-

- b) Rp188.385.171,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 39/BN.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 - c) Rp21.141.500 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang merupakan Penghentian Penggunaan di Satuan Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupa 3 buah AC Split sesuai dengan Berita Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 01/BAP.PBMN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020.
 - d) Rp2.373.034.417,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di Lingkungan



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 19/BN.04/2020 tanggal 25 September 2020.

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.05.01 - Alat Kantor	69.747.322	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	338.315.538	-
3.06.01 - Alat Studio	96.506.833	-
3.06.02 - Alat Komunikasi	27.066.000	-
3.10.01 - Komputer Unit	1.606.189.000	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	235.209.724	-
Jumlah	2.373.034.417	-

2. Reklasifikasi Keluar senilai Rp338.391.941,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	303.108.140	-
3.10.01 - Komputer Unit	27.798.801	-
3.15.03 - Alat SAR	7.485.000	-
Jumlah	338.391.941	-

3. Tidak ada Peralatan dan Mesin yang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember sebesar Rp124.756.454.088,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) Sebanyak 11.703 buah, dapat diuraikan Peralatan dan Mesin berdasarkan status kondisinya sebagai berikut:



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	11.653	Rp120.411.853.061,00
Rusak Ringan	18	Rp1.244.886.856,00
Rusak Berat	32	Rp3.099.714.171,00

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.01.01 - Alat Besar Darat	148.740.900	-
3.01.03 - Alat Bantu	2.233.328.830	-
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	26.232.465.675	-
3.02.02 - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.486.250	945.000
3.03.01 - Alat Bengkel Bermesin	6.884.958	-
3.03.02 - Alat Bengkel Tak Bermesin	31.499.669	-
3.03.03 - Alat Ukur	252.204.600	-
3.04.01 - Alat Pengolahan	61.760.250	550.000
3.05.01 - Alat Kantor	7.626.522.740	7.191.952
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	17.366.131.501	194.157.254
3.06.01 - Alat Studio	1.953.310.293	6.420.396
3.06.02 - Alat Komunikasi	1.973.828.066	570.900
3.06.03 - Peralatan Pemancar	23.797.050	627.300
3.07.01 - Alat Kedokteran	196.412.939	3.434.050
3.07.02 - Alat Kesehatan Umum	1.497.000	-
3.08.01 - Unit Alat Laboratorium	807.353.110	1.546.875
3.08.02 - Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30.328.832	-
3.08.03 - Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12.957.830	-
3.08.04 - Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7.012.500	-
3.08.05 - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	109.614.870	-
3.08.07 - Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	65.928.431	-
3.08.08 - Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	8.773.310	-
3.09.02 - Peralatan Non Senjata Api	71.200.000	-
3.09.04 - Alat Khusus Kepolisian	73.510.399	440.000
3.10.01 - Komputer Unit	17.216.862.168	5.069.160
3.10.02 - Peralatan Komputer	11.907.309.597	8.103.340
3.11.02 - Alat Eksplorasi Geofisika	3.900.000	-
3.15.02 - Alat Pelindung	23.100.000	-
3.15.03 - Alat Sar	37.531.313	-
3.15.04 - Alat Kerja Penerbangan	95.630.700	420.900
3.17.01 - Unit Peralatan Proses/Produksi	98.372.500	-
3.18.01 - Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	17.521.422	-
3.19.01 - Peralatan Olah Raga	10.924.166	-
JUMLAH	88.708.701.869	229.477.127

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp72.771.604.892,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), mutasi tambah sebesar Rp4.465.012.200,00 (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta dua belas ribu dua ratus rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo per 31 Desember 2020;

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp72.771.604.892,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), mutasi tambah sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp4.465.012.200,00 (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta dua belas ribu dua ratus rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp4.465.012.200,00 tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.599.931.200	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	27.827.000	-
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	276.303.000	-
Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	66.362.000	-
Gedung Pos Jaga Permanen	-	13.401.000
Bangunan Kolam/Bak Ikan	-	5.247.000
Pagar Permanen	475.941.000	
Jumlah	4.446.364.200	18.648.000

Tidak ada mutasi kurang Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2020.



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Dari saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah) sebanyak 10 buah berada dalam kondisi baik.

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIAN JENIS TRANSAKSI	JUMLAH UNIT	AKUMULASI PENYUSUTAN
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	6.207.709.923
Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	278.270
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	86.260.673
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	736.089.844
Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	1	663.620
Gedung Pos Jaga Permanen	1	134.010
Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	52.470
Pagar Permanen	1	4.759.410
Jumlah	10	7.035.948.220

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.395.216.550,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.395.216.550,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.395.216.550,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar



Rp1.395.216.550,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan tidak terdapat transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun Anggaran 2020.

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.395.216.550,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2 unit, dapat diuraikan semua Kondisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 berada dalam kondisi baik.

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN JENIS TRANSAKSI	JUMLAH UNIT	AKUMULASI PENYUSUTAN
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	387.973.345
Jaringan Telepon	1	305.346.125
Jumlah	2	693.319.470

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.984.155.712,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.181.187.595,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 1.028.164.432,00 (satu milyar dua puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp225.196.315,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah).

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.984.155.712,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta



seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset Tetap Lainnya sejumlah 2785 buah dengan nilai sebesar Rp1.181.187.595,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Mutasi tambah sejumlah 239 buah dengan nilai sebesar Rp 1.028.164.432,00 (satu milyar dua puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 6 buah dengan nilai sebesar Rp225.196.315,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.028.164.432,00 tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	188.787.665	
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	786.569.237	
Bahan Perpustakaan Tercetak	52.807.530	-
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
Tanaman	-	-
Jumlah	1.028.164.432	-

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rp225.196.315,00 tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	188.787.665	
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	36.408.650	
Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
Tanaman	-	-
Jumlah	225.196.315	-

Dari jumlah aset tetap Lainnya di atas tidak ada Aset Tetap Lainnya yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga

Dari saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember sebesar Rp1.869.655.712,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sebanyak 3.018 buah berada dalam kondisi baik.



g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.916.600,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp Rp74.916.600,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	NILAI (RP)
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	-
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	74.916.600
Jumlah	74.916.600

Mutasi tambah sebesar Rp74.916.600,00 merupakan jasa konsultan perencanaan renovasi bangunan di Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang eksekusi renovasi Gedung dan Bangunannya akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan renovasi dimaksud telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2021.

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	NILAI (RP)
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	-
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-
Jumlah	-

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.554.509.241,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 6.786.681.820,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta



enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp5.046.130.538,00 (lima milyar empat puluh enam juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp4.278.303.117,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

- 1) Kementerian PANRB tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- 2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.433.653.570,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 90 buah dengan nilai sebesar Rp4.214.073.020,00 (empat milyar dua ratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), mutasi penambahan sejumlah 49 buah dengan nilai sebesar Rp2.079.740.450,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 74 buah dengan nilai sebesar Rp1.860.159.900,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Mutasi Tambah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.079.740.450,00 tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
Software	887.285.500	-
Lisensi	171.100.000	-
Jumlah	1.058.385.500	-

Mutasi tambah sebesar Rp1.058.385.500,00 berasal dari pembelian baru *software* di Satker KASN senilai Rp804.855.500,00 dan pembelian lisensi senilai Rp171.100.000,00 serta pengembangan *software* di Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai Rp82.430.000,00

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.860.159.900,00 tersebut meliputi:



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
Software	1.021.354.950	-
Lisensi	-	-
Jumlah	1.021.354.950	-

Mutasi kurang senilai Rp1.021.354.950,00 merupakan penghentian aset tak berwujud dari penggunaan sesuai Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN di Lingkungan Kementerian PANRB Nomor 39/BN.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas tidak ada Aset Tak Berwujud yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebesar Rp.182.550.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri dari mutasi penambahan sejumlah 38 buah sebesar Rp1.021.354.950,00 (satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 36 buah sebesar Rp838.804.950,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.120.855.671,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 9 buah dengan nilai sebesar Rp2.572.608.800,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), mutasi tambah sejumlah 320 buah dengan nilai sebesar Rp2.966.390.088,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 294 buah dengan nilai sebesar Rp2.418.143.217,00 (dua



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

milyar empat ratus delapan belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	383.629.000	-
3.05.01 - Alat Kantor	69.747.322	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	368.957.038	-
3.06.01 - Alat Studio	96.506.833	-
3.06.02 - Alat Komunikasi	27.066.000	-
3.10.01 - Komputer Unit	1.775.159.171	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	245.124.724	-
Jumlah	2.966.390.088	-

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-
3.05.01 - Alat Kantor	69.747.322	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	338.315.538	-
3.06.01 - Alat Studio	96.506.833	-
3.06.02 - Alat Komunikasi	27.066.000	-
3.10.01 - Komputer Unit	1.651.297.800	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	235.209.724	-
Jumlah	2.418.143.217	-

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL
3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor	2.581.329.000	-
3.05.02 - Alat Rumah Tangga	26.541.572	-
3.10.01 - Komputer Unit	143.169.296	-
3.10.02 - Peralatan Komputer	339.915.000	-
Jumlah	3.090.954.868	-

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Kementerian PANRB tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

3. Barang Milik Negara pada Kementerian PANRB Per 31 Desember 2020

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.676.607.180,00 (dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	1.415.814.897	0,57%	-	0,00%	1.415.814.897	0,57%
	Sub Jumlah(1)	1.415.814.897	0,57%	-	0,00%	1.415.814.897	0,57%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	32.784.833.000	13,29%	-	0,00%	32.784.833.000	13,29%
2	Peralatan dan Mesin	124.345.957.662	50,41%	410.496.426	0,17%	124.756.454.088	50,57%
3	Gedung dan Bangunan	77.217.969.092	31,30%	18.648.000	0,01%	77.236.617.092	31,31%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.395.216.550	0,57%	-	0,00%	1.395.216.550	0,57%
5	Aset Tetap Lainnya	1.119.495.125	0,45%	114.500.000	0,05%	1.233.995.125	0,50%
6	Aset Tetap Renovasi	750.160.587	0,30%	-	0,00%	750.160.587	0,30%
7	KDP	74.916.600	0,03%	-	0,00%	74.916.600	0,03%
	Sub Jumlah(2)	237.688.548.616	96,36%	543.644.426	0,22%	238.232.193.042	96,58%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Aset Tak Berwujud	3.907.743.570	1,58%	-	0,00%	3.907.743.570	1,58%
3	Aset Lain-lain	3.120.855.671	1,27%	-	0,00%	3.120.855.671	1,27%
	Sub Jumlah(3)	7.028.599.241	2,85%	-	0,00%	7.028.599.241	2,85%
	Total	246.132.962.754	99,78%	543.644.426	0,22%	246.676.607.180	100,00%



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Kementerian PANRB Per 31 Desember 2020 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	88.708.701.869	86,23%	299.477.127	0,29%	89.008.178.996	86,52%
2	Gedung dan Bangunan	7.032.399.702	6,84%	180.480	0,00%	7.032.580.182	6,84%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	693.319.470	0,67%	-	0,00%	693.319.470	0,67%
4	Aset Tetap Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Jumlah (1)	96.434.421.041	93,74%	299.653.607	0,29%	96.734.074.648	94,03%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0,00%	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	2.876.201.835	2,80%	-	-	2.876.201.835	2,80%
3	Aset Lain-lain	3.267.873.618	3,18%	-	-	3.267.873.618	3,18%
	Sub Jumlah (2)	6.144.075.453	5,97%	-	-	6.144.075.453	5,97%
	Total	102.578.496.494	99,71%	299.653.607	0,29%	102.878.150.101	100,00%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	LAP. BARANG	LAP. KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	1.415.814.897	1.415.814.897	-
2	Tanah	32.784.833.000	32.784.833.000	-
3	Peralatan dan mesin	124.756.454.088	124.756.454.088	-
4	Gedung dan Bangunan	77.236.617.092	77.236.617.092	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.395.216.550	1.395.216.550	-
6	Aset Tetap Lainnya	1.984.155.712	1.984.155.712	-
7	KDP	74.916.600	74.916.600	-
8	Aset Tak Berwujud	3.907.743.570	3.907.743.570	-
	Aset Lain - Lain yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			
9		3.120.855.671	3.120.855.671	-
	Total	246.676.607.180	246.676.607.180	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp.0,00 (*Not Rupiah*).

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	2016	Rp125.178.790.000	Rp16.309.496.388	15%
2	2017	Rp151.441.147.063	Rp26.262.357.063	21%
3	2018	Rp179.893.810.035	Rp28.452.662.972	19%
4	2019	Rp193.410.121.262	Rp13.516.311.227	8%
5	2020	Rp246.676.607.180	Rp53.266.485.918	28%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin			11.718	107.568.278.170
3	Gedung dan Bangunan			1	142.066.804
4	Jalan, Irigasi, Jaringan				
5	Aset Tetap lainnya				
6	Aset Tak Berwujud			5	2.204.403.970
JUMLAH				11.724	109.914.748.944

Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	✓	-	1

b. Pengelolaan BMN *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kementerian PANRB tidak memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi, sehingga tidak ada BMN dari dana dekonsentrasi pada Kementerian PANRB.

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Kementerian PANRB tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), sehingga tidak ada BMN yang dikelola oleh satuan kerja BLU.

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999).

Tidak ada BMN yang berasal dari dana Belanja Lain-lain pada Kementerian PANRB.



6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Selama Tahun 2020 Kementerian PANRB tidak pernah mengajukan pengusulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang

7. BMN Berupa BPYBDS

Kementerian PANRB tidak memiliki BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

8. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- 1) Penggunaan aplikasi SAKTI secara online dalam pengelolaan BMN yang terintegrasi dengan penganggaran dan keuangan secara langsung dan berjenjang sehingga berbeda teknis pelaksanaannya dengan aplikasi-aplikasi BMN sebelumnya;
- 2) Penerapan proses bisnis penatausahaan dalam transaksi pencatatan mulai dari perolehan, pengembangan, inventarisasi sampai dengan penghapusan aset sesuai dengan regulasi atau teknis pelaksanaannya pada aplikasi SAKTI

9. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan teknis dalam penatausahaan BMN yang menggunakan aplikasi SAKTI melalui Bimbingan Teknis;
- 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan admin aplikasi SAKTI melalui Direktorat SITP (Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BMN di Kementerian PANRB.

VI. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:



- (1) “Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.”
- (2) “Keputusan mengenai Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan jembatan, dan
 - 2) Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2020.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan



efisiensi dan anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian selain Tanah. Untuk satker /Eselon I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian kembali BMN Mulai tahun 2017 dan selesai di tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN

Pada Satker Eselon I Kementerian PANRB

Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai BMN	
			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rp27.541.781.405,00	Rp56.622.616.000,00
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Rp119.677.211,00	Rp202.291.000,00
Total		3	Rp27.661.458.616,00	Rp56.824.907.000,00

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali aset Tetap yang menjadi obyek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak di temukan dan barang dalam sengketa.



Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 2 NUP dengan total nilai kenaikan nilai BMN sebesar Rp5.291.283.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp56.622.616.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp61.913.899.000,00.

Selain itu juga terdapat satu NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang dilakukan Penilaian Kembali BMN Tahun 2020 dengan total nilai kenaikan nilai BMN untuk satu NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen tersebut sebesar Rp276.303.000.

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Satker Eselon I Kementerian PANRB
Per 31 Desember 2020**

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenaikan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan	Nilai Wajar Setelah Perbaikan	
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rp56.622.616.000	Rp61.913.899.000	Rp5.291.283.000
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Rp202.291.000	Rp478.594.000	Rp276.303.000
Total		3	Rp56.622.616.000	Rp61.913.899.000	Rp5.567.586.000

**VII. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019.**

Sesuai laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Lembaga/lembaga tahun 2019, terdapat temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan



**CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)**

persediaan. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2019 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

**REKAPITULISASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
per 31 Desember 2020**

NO	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
	Penatausahaan Persediaan Kurang Memadai	menyempurnakan SOP Pengelolaan Persediaan Persediaan

Kepala Bagian Tata Usaha
dan Layanan Pengadaan



Wahidul Kabbar, M.A. M.I. Kom
NIP. 197311302002121002



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIRKORASI**

Jalan Jenderal Sudirman Kav 69 (021) 73988381